

SKRIPSI

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA API-API KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS

Diajukan Untuk Melengkapi Serta Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi
Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :

REFIDEN
NIM. 10775000176

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

**R I A U
2011**

ABSTRAK

*Skripsi ini berjudul: **PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA API-API KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS.***

Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat pada pasal 10 ayat 2 yaitu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Konsekuensi dari implementasi otonomi daerah, salah satu perubahan yang fundamental adalah terjadinya pergeseran struktur organisasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang jauh berbeda dibandingkan dari sebelumnya. Yaitu lahirnya organisasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang diharapkan mampu memberikan dinamika serta suasana yang lebih demokratis, otonom, independen dalam pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dampak khususnya adalah diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih berdaya guna dan dapat menegakkan otonomi daerah lebih efektif dan efisien.

Menurut PP No. 72 tahun 2005, serta Perda Kabupaten Bengkulu No. 06 tahun 2008 bahwa BPD adalah badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini, karena lokasinya mudah dijangkau oleh penulis. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa cara, seperti kuisioner, wawancara, observasi, serta riset pustaka sesuai dengan masalah yang diteliti.

Di Desa Api-Api dalam pelaksanaan fungsinya belum berjalan dengan optimal. Sebagai badan perwakilan dari penduduk desa, BPD diharapkan mampu memberikan dinamika serta suasana yang lebih demokratis, otonom, independen dalam pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dampak khususnya adalah diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih berdaya guna dan dapat menegakkan otonomi daerah lebih efektif dan efisien.

Penulis,

REFIDEN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.A. Latar Belakang Masalah	1
1.B. Perumusan Masalah	10
1.C. Tujuan Penelitian	11
1.D. Manfaat Penelitian	11
1.E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.A. Pengertian Fungsi	15
2.B. Pemerintahan Desa	16
2.C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	21
2.D. Definisi Konsep	24
2.E. Definisi Operasional	25
2.F. Teknik Pengukur Skor	26
2.G. Hipotesa	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.A. Tempat dan Waktu Penelitian	29

3.B. Jenis dan Sumber Data	29
3.C. Populasi dan Sampel	29
3.D. Teknik Pengumpulan Data	31
3.E. Analisis Data	32

BAB IV GAMBARAN UMUM TENTANG DESA API-API

4.A. Geografi Desa Api-Api	33
4.B. Demografi	34
4.C. Sosial Budaya	36
4.D. Pendidikan dan Agama	38
4.E. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa Api-Api	41

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.A. Identitas Responden	49
5.B. Fungsi BPD di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis	53
5.B.1. Pengawasan	53
5.B.2. Legislasi.....	63
5.B.3. Mengayomi.....	76
5.B.4. Menyampaikan Aspirasi.....	87
5.C. Faktor Penyebab Mengapa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Belum Dapat Menyelenggarakan Fungsinya Dengan Baik	96

BAB VI PENUTUP

6.A. Kesimpulan.....	103
6.B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara memberikan keluasan dan peluang bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, maka dari itu yang paling mendasar sekali adalah adanya kewenangan yang luas pada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dari pelaksanaan otonomi daerah yang secara nyata maka akan tercipta suatu kondisi dimana segala kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang mana telah direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004, secara tidak langsung merubah sistem pemerintahan di Indonesia dari paradigma sentralisasi ke desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang lebih baik, luas, dan bertanggungjawab. Konsekuensi perubahan yang dikehendaki salah satunya adalah pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam pelayanan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah, termasuk pemerintahan desa sekalipun.

Semenjak berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masyarakat menaruh harapan besar kepada implementasi dari otonomi daerah itu, kehadiran otonomi daerah merupakan angin segar dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa. Pemerintah memberikan kebebasan dan keluasan untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat pada pasal 10 ayat 2 yaitu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Konsekuensi dari implementasi otonomi daerah, salah satu perubahan yang fundamental adalah terjadinya pergeseran struktur organisasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang jauh berbeda dibandingkan dari sebelumnya. Yaitu lahirnya organisasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang diharapkan mampu memberikan dinamika serta suasana yang lebih demokratis, otonom, independen dalam pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dampak khususnya adalah diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih berdaya guna dan dapat menegakkan otonomi daerah lebih efektif dan efisien. Mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka dibentuk badan/organisasi yang dinamakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut PP No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa BPD adalah badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak

11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Menurut Perda Kabupaten Bengkalis No. 06 tahun 2008 pasal 1, BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah sebagai lembaga legislatif dan pengawasan desa dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa.

Selain itu, lembaga ini merupakan lembaga legislatif mini yang berkerja sama dengan Kepala Desa sebagai eksekutif dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan roda pemerintahan. Dalam proses kerja sama kedua lembaga tersebut merupakan mitra sejajar untuk menentukan arah pembangunan suatu desa. Sebaliknya, di Desa Api-Api dengan adanya mitra sejajar ini malah terjadi konflik antara Kepala Desa dan BPD, misalnya dalam bentuk perbedaan pendapat, kepentingan, ide dan interpretasi (pemahaman) pada saat rapat-rapat koordinasi dengan BPD atau saat merumuskan Peraturan Desa sehingga mengganggu jalannya Pemerintahan Desa. Satu kasus yang membuat jalannya roda Pemerintahan Desa agak terganggu, yaitu pada saat penentuan Pjs Sekretaris Desa, yang membuat masyarakat Desa Api-Api bingung karena terdapat dualisme.

Masyarakat menginginkan BPD bukan saja sebagai media penyampaian aspirasi masyarakat tetapi juga mampu menjalankan fungsi pengawasannya terhadap peraturan-peraturan Kepala Desa yang selama ini dianggap tidak optimal, misalnya disaat salah satu dari aparat desa berjudi dan meminum minuman keras tidak sedikitpun mendapatkan sanksi tegas dari Kepala Desa.

Kenyataan demikian sering didengar dan dilihat oleh BPD bahkan Kepala Desa bahwa benar aduan masyarakat terhadap aparat desa tersebut. Namun tidak ada kebijakan atau tindakan sedikpun dari BPD maupun Kepala Desa. Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi hilang arah karna tidak ada contoh yang baik dari aparat desa dan BPD sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Dan masyarakat menilai BPD hanyalah lembaga yang dibentuk sebagai formalitas.

Peningkatan kualitas kinerja BPD akan merujuk seberapa banyak energi birokrasi dimanfaatkan untuk menyelenggarakan fungsi dan tugasnya dengan optimal sebagai lembaga yang mengemban tugas menampung, menghimpun, merumuskan, menyalurkan, dan menggali aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan fungsi BPD pada prinsipnya mengemban fungsi pengawasan terhadap kinerja aparat desa dan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam kondisi apapun. Sehingga BPD diharuskan mampu untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebaik mungkin. BPD telah dilengkapi dengan berbagai instrumen serta sarana yang diharapkan mampu memacu kinerjanya secara optimal, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan, misalnya komputer yang sudah disediakan seharusnya digunakan untuk keperluan lain malah dijadikan sarana hiburan dengan bermain *game*, bahkan ada yang tidak mengerti bagaimana cara mengoprasikannya.

Ketidakmampuan BPD dalam pelaksanaan fungsinya yang telah ditetapkan dalam fungsi BPD bukan menjadi rahasia BPD itu sendiri tetapi sudah menjadi rahasia umum yang tidak perlu ditutup-tutupi, sehingga mempengaruhi pandangan atau *image* masyarakat terhadap kinerja BPD yang tidak berjalan secara optimal,

misalnya dalam pengawasan terhadap kinerja aparat desa yang asal-asalan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, jarang masuk jam-jam kerja, dan selalu menyuruh masyarakat mengurus sendiri keperluannya ke kantor camat tanpa rekomendasi dari desa.

Daerah otonom dibentuk pada dasarnya untuk meningkatkan partisipasi dan taraf hidup masyarakat, sesuai dengan potensi yang berkembang di suatu wilayah. Maksud dibentuknya daerah otonom adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.

Dalam pembangunan partisipasi masyarakat merupakan elemen proses pembangunan, terutama dalam masyarakat pedesaan, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti Pemerintahan Desa, sehingga dengan adanya keterlibatan Pemerintahan Desa besar kemungkinan masyarakat akan diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri.

Sementara itu, BPD di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang seharusnya mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui tugas dan fungsi dengan baik malah tidak berfungsi, misalnya disaat salah seorang warga Desa Api-Api menyatakan pendapat dan sarannya untuk kemajuan desa sendiri malah dianggap angin lalu oleh ketua BPD saat itu.

Secara *histories* (sejarah), desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia. Jauh sebelum negara dan pemerintahan ini terbentuk, keadaan dari sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain-lain, telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat-istiadat, dan norma-norma yang mengakar kuat secara relatif mandiri dari campur tangan etensitas kekuasaan dari pihak luar.

Sejak berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, masyarakat daerah menaruh harapan besar terhadap implementasi otonomi desa. Kehadiran otonomi daerah bagi setiap masyarakat di desa memberikan dinamika baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa. Masyarakat sadar bahwa keberadaan institusi-institusi demokrasi desa selama ini berada dalam posisi yang sangat tidak kondusif dalam penegakkan demokrasi pada masyarakat perdesaan.

Konsekuensi implementasi otonomi daerah yang dimanfaatkan dalam UU No. 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, terdapat dalam pasal 206 yaitu mengenai urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangannya mencakup sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Hadirnya BPD diharapkan mampu memberikan terobosan didalam pemberdayaan dan pencerdasan kepada masyarakat desa untuk membangun kemandirian, kreatifitas, mengatur rumah tangganya sendiri dan membuka ruang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Sehingga keinginan yang telah lama didambakan masyarakat desa untuk memiliki otonomi dan integrasi sebagai kesatuan masyarakat serta kedaulatan dan hak wilayahnya dalam menjalankan pemerintahan secara otonom untuk menciptakan kemakmuran dapat diraih.

Tabel I.1: Daftar Jumlah Aparat Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Ketua BPD	1	-
2	Wakil BPD	1	-
3	Anggota BPD	7	-
4	Kepala Desa	1	-
5	Sekretaris Desa	1	-
6	Kepala Urusan	3	3 Bidang
7	Kepala Dusun	3	3 Bidang
8	Petugas Kebersihan	3	-
	Jumlah	20	

Sumber: Kantor Kepala Desa Api-Api Tahun 2011

BPD di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis berjumlah 9 orang, sebagai organisasi yang terlahir pada Era Reformasi. Namun perkembangan yang terjadi di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis tidak seperti apa yang kita kira, karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang layaknya berperan mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan

Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa belum berfungsi dengan baik yang sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu terjadi kevakuman dalam menjalankan fungsinya.

Pelaksanaan fungsi BPD membutuhkan kemampuan kerja aparatur yang baik serta keterampilan dalam mengantisipasi berbagai perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat dan mampu menampung aspirasi dari masyarakat. Supaya kebutuhan masyarakat dapat diantisipasi dengan baik dan optimal. Namun realitanya, pelaksanaan fungsi dan tugas BPD khususnya dalam pelaksanaan fungsi BPD belum berjalan dengan optimal yang terindikasi melalui gejala-gejala sebagai berikut:

1. Kurangnya hubungan komunikasi antar anggota BPD, dengan Aparat Desa dan dengan masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kepedulian dan keinginan aparat desa serta masyarakat untuk menghadiri rapat yang di undang oleh BPD itu sendiri, untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel I.2: Absensi Rapat Tanggal 12 Januari 2011

No	Undangan	Hadir	Tidak Hadir
1	Anggota BPD	3	6
2	Aparat Desa	9	11
3	Masyarakat	7	20
Jumlah		19	37

Sumber: Ketua BPD Desa Api-Api Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kurangnya komunikasi dari sesama anggota BPD, dengan Aparat Desa, serta dengan masyarakat. Karena dari 40

undangan yang disebarkan tidak sampai separuh dari undangan tersebut yang menghadiri rapat pada saat itu.

Disamping itu kurangnya komunikasi dengan Aparat Desa juga dapat dilihat dari absensi Aparat Desa setempat dibawah ini:

Tabel I.3: Daftar Tingkat Kehadiran Aparat Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2010

No	Bulan	Jumlah Aparat	Jumlah Yang Tidak Hadir	Persentase
1	Januari	20	5	25.00%
2	Februari	20	7	35.00%
3	Maret	20	11	55.00%
4	April	20	9	45.00%
5	Mei	20	7	35.00%
6	Juni	20	16	80.00%
7	Juli	20	9	55.00%
8	Agustus	20	13	65.00%
9	September	20	6	30.00%
10	Oktober	20	10	50.00%
11	Nopember	20	6	30.00%
12	Desember	20	9	45.00%

Sumber: Kantor Kepala Desa Api-Api Tahun 2011

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa masih kurangnya pengawasan BPD terhadap aparat desa sehingga kinerja Pemerintahan Desa dinilai sangat rendah yang bisa menghambat kelancaran pelaksanaan program desa yang sudah ditetapkan. Kehadiran aparat desa tersebut jauh dari apa yang diharapkan dan dianggap telah melanggar aturan-aturan yang berlaku. Dari daftar kehadiran di atas yang sangat buruk terjadi pada bulan Juni mencapai 80.00%.

2. Kurangnya pengawasan BPD terhadap aparat desa sehingga kinerja pemerintahan desa dinilai masih rendah yang bisa menghambat kelancaran program desa yang telah ditetapkan.

Menurut Nopri (2008: 97) kegiatan pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, secara langsung mengawasi terhadap objeknya dan apabila dijumpai hal-hal yang tidak serasi langsung dapat diberikan teguran. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung merupakan kegiatan pengawasan tidak secara langsung kepada objeknya, tetapi memperhatikan pada hasil yang diselesaikan dan atau pengaruh yang diakibatkannya.

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis belum terlaksana secara optimal dalam melaksanakan fungsinya, padahal idealnya fungsi BPD terbentuk dalam suatu pembagian tugas, adanya hirarki wewenang serta kemampuan teknis karir sangat memungkinkan keterlaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis”**.

1.B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan di atas, permasalahan yang menjadi perhatian penulis adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis?
- b. Mengapa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis belum optimal?

1.C. Tujuan Penelitian

Setiap orang mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan begitu juga dengan penelitian yang penulis lakukan. Tujuan dalam penelitian penulis kali ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, PP No. 72 tahun 2005, serta Perda Kab. Bengkalis No. 06 tahun 2008.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab mengapa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis belum dapat menyelenggarakan fungsinya dengan baik.

1.D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat :
 - a. Bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam membuat karangan ilmiah.

- b. Memberikan data empirik hasil penelitian mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
- c. Sebagai perbandingan bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang dan segala pemanfaatan dari tulisan ini.

1.D. Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini dibagi atas enam pokok pembahasan (bab) dan masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bagian, seperti berikut ini:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Telaah Pustaka

Dalam bab ini penulis membahas tentang konsep-konsep teoritis yang relevan dengan judul penelitian yang penulis lakukan dalam beberapa bulan terakhir.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis membahas tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teori pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini penulis membahas tentang keadaan geografis, demografi, keadaan sosial budaya, pendidikan dan keagamaan masyarakat di tempat penulis melakukan penelitian.

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis membahas tentang permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian, dan tindakan selanjutnya penulis lakukan analisis dari hasil penelitian.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini penulis jadikan penutup dan mengambil beberapa masukan serta saran-saran yang sifatnya berbentuk kesimpulan akhir dari penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.A. Pengertian Fungsi

Dalam setiap penelitian kerangka teori digunakan seluruh penulis untuk memberi landasan dasar yang dapat membantu peneliti dalam memecahkan masalah. Kerangka teori bermaksud untuk memberikan gambaran dan batasan tentang teori-teori yang dijadikan sebagai landasan peneliti yang melaksanakan penelitian.

Sebelum sampai pada pembicaraan tentang pengertian fungsi, maka terlebih dahulu disinggung konsepsi otonomi daerah karena bagaimanapun terbentuknya BPD merupakan hasil dari otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (HAW. Widjaja, 2004: 98).

Menurut Syaukani (2005: 144) otonomi daerah pada hakekatnya merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalanya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Fungsi adalah peranan yang terdiri dari tugas dan tanggungjawab, dilakukan secara sadar, mempunyai tujuan yang efektif dan efisien, terealisasi berdasarkan perencanaan sifat dan bentuk kegitannya.

Fungsi menurut The Liang Gie (1982: 135) adalah sekelompok aktifitas yang tergolong dalam jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya, ataupun pertimbangan lainnya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa untuk melakukan suatu usaha kerja sama, aktifitas-aktifitas yang sama jenisnya itu biasanya digabung menjadi satu kesatuan dan diserahkan kepada tanggungjawab seorang pejabat atau organisasi.

Menurut Edwin (1984: 100) fungsi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kerja yang dapat dibedakan dari aktivitas atau kerja lain.

Fungsi menurut Veitzal Rivai (2004: 140) diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

Menurut Miftah Thoha (1990: 25) fungsi dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuannya ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karna adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

2.B. Pemerintahan Desa

Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang daerah besar dan kecil sebagai mana dalam pasal 18 UUD 1945 tersebut dibentuk dan disusun dalam rangka daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang dimaksud untuk pelaksanaan asas desentralisasi.

Pemerintah Desa berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, dan PP No. 72 tahun 2005, serta Perda Kabupaten Bengkalis No. 04 tahun 2008 pasal 2 yaitu terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, atau yang disebut dengan nama lain. istilah Kepala Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sumber daya desa setempat, ia dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat-syarat. Calon Kepala Desa yang dipilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disahkan oleh Kepala Daerah (Bupati).

Desa berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 adalah desa yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis. Wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/Kota. Sebagai mana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut UU No. 32 tahun 2004, dan PP No. 72 tahun 2005 pasal 52, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial

budaya setempat dipilih menjadi Kepala Desa penduduk di desa yang tentunya warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

1. Berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
3. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945. G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau berpengetahuan sederajat;
5. Berumur lebih kurang 25 tahun;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa; dan
9. Tidak dalam status jabatan rangkap dalam Pemerintahan Desa.

Menurut UU No. 32 tahun 2004, PP No. 72 tahun 2005, serta Perda Kabupaten Bengkalis No. 04 tahun 2008, fungsi Pemerintah Desa sebagai mana disebutkan dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam Pemerintah Desa yaitu:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. Menyelenggarakan pembangunan Desa;
3. Menyelenggarakan dan membuat peraturan Desa;
4. Membina kehidupan masyarakat Desa;

5. Membina perekonomian Desa;
6. Melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
7. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa dengan baik;
8. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
9. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
10. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa.

Kepala Desa dipilih oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum memangku jabatannya. Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji Kepala Desa, dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang dianut dan diakui oleh pemerintah.

Sebagai suatu lembaga pemerintahan ditingkat yang paling bawah, pemerintahan desa memiliki susunan organisasi pemerintah. Adapun susunan organisasi pemerintah desa adalah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi
 - a. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, dan Perangkat Desa.
 - b. Susunan organisasi tersebut diatas ditetapkan oleh Kepala Desa sebab mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
2. Kedudukan, tugas dan kewajiban Kepala Desa
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - b. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - d. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.

3. Tugas perangkat desa

Tugas perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan perangkat desa terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing bertugas sebagai berikut:

- a. Unsur staf memberikan pelayanan administrasi.
- b. Unsur pelaksanaan merupakan pelaksanaan teknis lapangan.
- c. Unsur wilayah membantu diwilayah bagian yang disebut kepala dusun.

4. Tata kerja

Tata kerja dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa dan perangkat desa wajib menyelenggarakan tugas integrasi baik dalam lingkungannya maupun dengan organisasi itu sendiri dengan tugas pokoknya masing-masing (HAW. Widjaja, 2008: 126).

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang tugas-tugas kepala desa dalam pembangunan desa sebagai berikut:

- a. Memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- d. Membina kehidupan masyarakat desa.
- e. Membina perekonomian desa.

2.C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut UU No. 32 tahun 2004, PP No. 72 tahun 2005 bahwa BPD adalah badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Organisasi Sosial Politik, Pemuka Agama, Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Menurut Perda Kabupaten Bengkalis No. 06 tahun 2008 pasal 1, BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah sebagai lembaga legislatif dan pengawasan desa dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa.

Selain itu, lembaga ini merupakan lembaga legislatif mini yang berkerja sama dengan Kepala Desa sebagai eksekutif dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan roda pemerintahan. Dalam proses kerja sama tersebut kedua lembaga ini merupakan mitra sejajar untuk menentukan arah pembangunan suatu desa.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 dan PP No. 72 tahun 2005 serta Perda Kabupaten Bengkalis No. 06 tahun 2008 pasal 3, BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No. 06 tahun 2008 pasal 4 tentang Wewenang BPD terdiri dari :

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. Menyusun tata tertip BPD.

Sedangkan menurut Perda Kabupaten Bengkalis No. 06 tahun 2008 pasal 5, hak BPD terdiri dari :

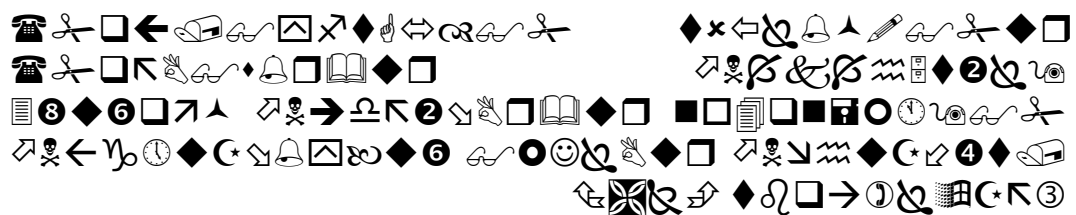
1. Meminta keterangan kepada Kepala Desa;
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
3. Mengajukan pernyataan;
4. Menyampaikan usul dan pendapat;
5. Memilih dan dipilih; dan
6. Memperoleh tunjangan dan biaya operasional.

Perda Kabupaten Bengkalis No. 06 tahun 2008 pasal 6, anggota BPD mempunyai kewajiban :

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

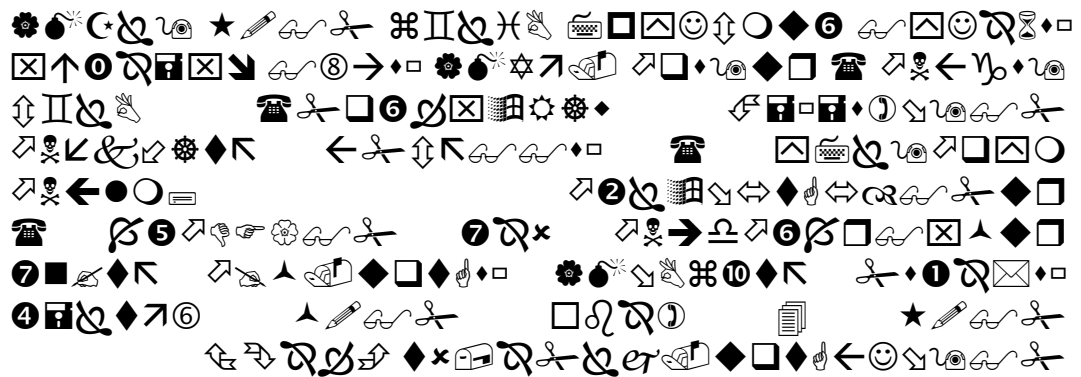
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
6. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;
9. Menjaga nama baik institusi BPD;
10. Mematuhi dan menjalankan sumpah janji pelantikan.

Berdasarkan uraian di atas Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syuura (42) ayat 38 yaitu:



Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. Asy-Syuura (42) ayat 38).

Selain surat Asy-Syuura (42) ayat 38, Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali 'Imram ayat 159 yaitu:



Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali 'Imran ayat 159).

2.D. Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Masri Hasibuan, 1989: 31).

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka ada beberapa konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan penelitian penulis diantaranya adalah:

1. Fungsi adalah peranan yang terdiri dari tugas dan tanggungjawab dengan dilakukan secara sadar, mempunyai tujuan yang efektif dan efisien, terealisasi berdasarkan perencanaan, sifat dan bentuk kegiatannya.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa setempat, yang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Membuat peraturan desa;
 - b. Menjaga, mengayomi adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di desa;
 - c. Menyalurkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat;
 - d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Desa adalah satuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional di daerah kabupaten.
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa, perangkat-perangkat desa dan termasuk didalamnya BPD.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2.E. Definisi Operasional

Operasional adalah unsur-unsur yang menggambarkan bagaimana cara untuk mengukur variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja yang bisa diambil sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan indikator sebagai berikut :

1. Pengawasan
 - a. Pengawasan BPD terhadap Pemerintahan Desa
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Desa
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa
2. Legislasi
 - a. Membuat Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa
 - b. Merumuskan Peraturan Desa
 - c. Menetapkan Peraturan Desa
3. Mengayomi
 - a. Membina lembaga adat
 - b. Memelihara dan melindungi lembaga adat
 - c. Mendukung keputusan-keputusan lembaga adat
4. Menyampaikan aspirasi
 - a. Menerima aspirasi dari masyarakat
 - b. Merumuskan aspirasi yang diterima dari masyarakat

2.F. Teknik Pengukur Skor

Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD tersebut, maka dilakukan pengukuran variabel fungsi secara keseluruhan sebagai berikut :

Sangat baik : Apabila keseluruhan indikator dan sub indikator yang telah ditetapkan sudah terlaksana dengan optimal, maka dapat dikategorikan sangat baik.

- Baik : Apabila keseluruhan indikator dan sub indikator yang telah ditetapkan hanya 1 indikator yang sub indikatornya 1 atau 2 tidak terlaksana dengan optimal, maka dapat dikategorikan baik.
- Cukup baik : Apabila keseluruhan indikator dan sub indikator yang telah ditetapkan hanya 1 indikator serta sub indikatornya saja tidak terlaksana, maka dapat dikategorikan cukup baik.
- Kurang baik : Apabila keseluruhan indikator dan sub indikator yang telah ditetapkan hanya 2 indikator dan sub-sub indikatornya saja tidak terlaksana dengan cukup baik, maka dapat dikategorikan kurang baik.
- Tidak baik : Apabila keseluruhan indikator dan sub indikator yang telah ditetapkan hanya 1 atau 2 bagian sub indikator saja yang berjalan dengan cukup baik, maka dapat dikategorikan tidak baik.

2.G. Hipotesa

Adapun hipotesa dalam penulisan ini yaitu **“Diduga bahwa dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Api-Api**

Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Belum Optimal di Sebabkan Karena Sumber Daya Manusia Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masih Rendah”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Jalan Jend. Sudirman (Jl. Lintas Dumai - Sei. Pakning). Waktu penelitian selama 3 bulan tercatat dari bulan November 2010 s/d Januari 2011.

3.B. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari pihak lain dari responden penelitian yang menggunakan cara mewancarai objek kajian dan dengan menggunakan kuisioner.

b. Data Skunder

Yaitu data yang penulis peroleh dari pihak lain dari laporan-laporan kantor Kepala Desa, seperti data keadaan geografis desa, keadaan sosial budaya desa, keadaan prekonomian desa dan data-data lainnya yang dianggap ada hubungan dengan sumber yang diteliti.

3.C. Populasi dan Sampel

1. Anggota BPD sebanyak 9 orang, karena jumlah populasinya relatif sedikit, maka penulis menjadikan seluruh populasi sebagai sampel penelitian dan teknik ini disebut teknik sensus.

2. Aparat Desa sebanyak 20 orang. Teknik yang penulis gunakan pada bagian ini teknik sensus, yaitu dengan menjadikan seluruh populasi sebagai sampel penelitian.
3. Masyarakat sebanyak 1.451 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu data yang diambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. mengingat keterbatasan penulis dalam biaya, waktu, tenaga, dan jarak penelitian yang jauh, maka penulis mengambil sampel penelitian dengan menggunakan rumus Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

e : nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan.

Dimana tingkat kesalahan yang diambil sebesar 10% dengan jumlah masyarakat sebesar 1.451 orang, maka didapatkan sampel sebesar :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1.451}{1 + 1.451(10\%)^2}$$

$$n = \frac{1.451}{1 + 1.451(0,1)^2}$$

$$n = \frac{1.451}{1+1.451(0,01)}$$

$$n = \frac{1.451}{1+15,51}$$

$$n = \frac{1.451}{16,51} = 87,88 \text{ (88 orang).}$$

Untuk lebih jelasnya populasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.1 : Rekapitulasi Populasi dan Sampel Penelitian Di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel/Responden	Persentase
1	Anggota BPD	9	9	100%
2	Aparat Desa	20	20	100%
3	Masyarakat	1.451	88	6.06%
4	Jumlah	1480	117	7.90%

Sumber : Desa Api-Api Tahun 2011

3.D. Teknik Pengumpulan Data

a. Quisioner

Cara ini penulis gunakan dengan menyebarkan daftar pertanyaan tertulis untuk diisi sebagai data primer guna untuk mendapatkan informasi yang akan penulis olah. Dengan cara ini juga bisa membantu dalam pemecahan masalah yang penulis teliti.

b. Wawancara

Cara ini penulis gunakan secara langsung dengan melakukan wawancara pada orang atau responden yang dianggap paling tahu tentang masalah yang dibahas, dengan menyusun beberapa daftar pertanyaan sesuai dengan keperluan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan.

c. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung kelokasi penelitian guna mengetahui kondisi atau keadaan yang sebenarnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian untuk merumuskan masalah yang timbul.

3.E. Analisis Data

Setelah data hasil penelitian terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analistik yang diawali dengan pemaparan tentang informasi dan fakta yang ada dilapangan. Kemudian dianalisis dengan pemaparan dalam bentuk informasi dan angka-angka yang diolah ke dalam tabel, dan bagan yang disertai penjelasannya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TENTANG DESA API-API

4.A. Geografi Desa Api-Api

Desa Api-Api adalah satu dari 14 (empat belas) Desa yang berada dibawah naungan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang luas wilayahnya mencakup daratan pesisir pulau Sumatera tepatnya ditepian Selat Bengkalis. Desa Api-Api terletak lebih kurang 56 Km dari Ibu Kota Kecamatan dan dari Desa Api-Api ke Ibu Kota Kabupaten lebih kurang setengah jam perjalanan menempuh jalur laut, sementara ke Ibu Kota Provinsi berjarak 536 Km.

Desa Api-Api mempunyai luas wilayah lebih kurang 5,9 Km². Daerah seluas ini terdiri dari perkampungan, lahan perkebunan, hutan dan pantai. Menurut data yang diperoleh, Desa Api-Api mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Bengkalis
- Sebelah selatan berbatasan dengan Hutan lindung
- Sebelah timur berbatasan dengan desa Temiang
- Sebelah barat berbatasan dengan desa Tenggayun

Adapun keadaan alam pada Desa Api-Api adalah daratan, dengan curah hujan rata-rata pertahun lebih kurang 10.000 mm dan keadaan suhu rata-rata 23 derajat celcius.

4.B. Demografi

Menurut data yang penulis peroleh dari kantor Kepala Desa Api-Api tahun 2011, jumlah penduduk Desa Api-Api 1.451 jiwa dengan 330 KK, yang terdiri dari 754 orang laki-laki dan 697 orang perempuan.

Tabel. IV.1: Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Api-Api

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki – laki	754	51,97%
2	Perempuan	697	48,03%
	Jumlah	1.451	100%

Sumber : Monografi Desa Api-Api tahun 2010

Apabila dilihat dari jenis kelamin, penduduk di Desa Api-Api laki-laki lebih mendominasi bilangannya dibandingkan dengan perempuan, yaitu laki-laki berjumlah 754 orang atau (51,97%), sedangkan perempuan hanya berjumlah 697 orang atau (48,03%).

Berdasarkan pengalaman penulis bahwa setiap desa itu pasti jumlah laki-lakinya yang mendominasi dari pada jumlah perempuannya. Dan kadang-kadang ada juga dimana pada suatu daerah itu apabila dijumlahkan laki-laki dan perempuan malah yang lebih mendominasi adalah jumlah perempuan pula. Apabila disesuaikan dengan pepatah orang tua-tua dahulu satu orang laki-laki itu perbandingannya dengan sepuluh perempuan.

Sedangkan menurut kelompok umur, jumlah penduduk Desa Api-Api sampai tahun 2010 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. VI.2: Klasifikasi Penduduk Menurut Kelompok Umur Desa Api-Api

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	0 – 4 Tahun	173	11,92%
2	5 – 15 Tahun	408	28,12%
3	16 – 25 Tahun	479	33,01%
4	26 – 50 Tahun	227	15,64%
5	51 – 70 Tahun	149	10,27%
6	76 Keatas	15	1,03%
Jumlah		1.451	100%

Sumber : Monografi Desa Api-Api tahun 2010

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, bahwa berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk berusia (16-25 tahun) menduduki tingkat pertama, yaitu sebanyak 479 orang atau (33,01%) dan yang menduduki tingkat paling akhir berusia (76 keatas) yang berjumlah 15 orang atau (1,03%). Adapun usia penduduk yang menduduki peringkat kedua adalah usia (5-15 tahun) berjumlah 408 orang atau (28,12%). Kemudian yang ketiga menyusul umur (26-50) berjumlah 227 orang atau (15,64%), untuk yang keempat adalah usia (0-4 tahun) berjumlah 173 orang atau (11,92%), dan peringkat kelima adalah usia (51-70) berjumlah 149 orang.

Mayoritas penduduk Desa Api-Api adalah penduduk asli sebanyak 95 %, sedangkan sisanya sebanyak 5% adalah pendatang dari berbagai daerah, karena adanya perkawinan campuran antara laki-laki dari daerah luar dengan perempuan yang berada dalam daerah Desa Api-Api dan begitu juga sebaliknya.

Juga faktor-faktor lainnya, karena terjadinya mobilisasi penduduk dan adanya pembukaan lahan perkebunan didalam wilayah Desa Temiang yang berhampiran dengan Desa Api-Api.

4.C. Sosial Budaya

Berbicara mengenai sosial budaya maka tidak terlepas dari adat istiadat dan kebudayaan, karena kedua-duanya bersumber dari tingkahlaku manusia.

Masyarakat Desa Api-Api memang sudah berkembang adat istiadatnya, namun adat yang dipakai maupun berkembang pada saat ini sebagaimana adat yang dipakai masyarakat Melayu pesisir pada umumnya. Dan adat masyarakat Desa Api-Api dipengaruhi oleh adat melayu di pulau Bengkalis. Karena secara kultural Desa Api-Api masih terletak dekat dengan Ibu Kota Kabupaten Bengkalis yang selama ini sering disebut orang banyak sebagai adat Melayu pesisir (Muhd. Nur Said, Tokoh Adat, *Wawancara*, tanggal 12 Januari 2011). Jika kita melihat jarak antara Kota Bengkalis dengan Desa Api-Api ke Ibu Kota Kabupaten hanya setengah jam perjalanan laut. Karena masih dekat jarak antaranya maka tidak ada perbedaan yang berarti dengan adat masyarakat Bengkalis pada umumnya.

Didalam adat pergaulan masyarakat Desa Api-Api maupun masyarakat Bengkalis, didalam kehidupan sehari-hari, nampak bahwa budaya atau adat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama islam dimana dalam tata bergaul sehari-hari selalu mengedepankan moralitas kesopanan, seperti orang muda menghormati orang tua dengan memanggil *young* atau *ngah* dan sebagainya.

Kemudian adat istiadat mengenai peresmian perkawinan, tidak jauh beda dengan kebiasaan masyarakat Desa Api-Api dalam hal perkawinan tidak banyak larangan, hanya mengikuti Syari'at islam siapapun boleh melakukan perkawinan selagi itu tidak dilarang oleh syari'at islam. Hal ini pula yang membedakan antara kebudayaan masyarakat Desa Api-Api dengan masyarakat lain yang lebih mengedepankan hukum adat pada umumnya.

Sebelum melakukan akad nikah, kebiasaan masyarakat Desa Api-Api terlebih dahulu melakukan sebuah rangkaian acara yang disebut dengan *Merisik* (Khairil Anwar, Kepala Desa Api-Api, *Wawancara*, tanggal 12 Januari 2011). Merisik merupakan sebuah ajang perkenalan oleh calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan melalui keluarga laki-laki yang datang kepada keluarga calon mempelai perempuan dengan mengajukan pertanyaan apakah sang gadis sudah ada yang mengikat atau belum dan apakah keluarga dapat menerima calon laki-laki tersebut dan sebagainya yang berkaitan dengan keadaan calon mempelai. Dan apabila ada kesepakatan yang biasanya terlebih dahulu pihak keluarga perempuan akan menanyakan kepada sang gadis apakah ia mau menerima sang laki-laki yang dimaksud. Kalau sang gadis mau menerima maka langkah selanjutnya adalah mengantar tanda atau tunangan. Dan apabila tiba waktu hari pernikahan maka mempelai laki-lakilah yang datang kerumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh kelompok kompiang. Diwaktu akan berangkat ke rumah pengantin perempuan, terlebih dahulu menyediakan bahan pantun memantun untuk menjawab pantun dari pihak perempuan yang diajukan

ketika mempelai laki-laki akan masuk rumah perempuan dan juga dipersiapkan nasi kunyit dan telur yang dihias dan lain-lainnya.

Diwaktu akan berangkat kerumah mempelai perempuan diiringi dengan bunyi-bunyian rebana (kompang) oleh anggota berzikir. Setelah sampai kerumah mempelai perempuan ada acara yang dilalui yaitu makan bersama, berdo'a dan sesudah itu barulah dianggap selesai prosesi perkawinan.

4.D. Pendidikan dan Agama

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu yang esensial dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan perorangan, keluarga, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa, negara dan agama ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan masyarakat itu sendiri.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan tersebut pemerintah dibantu masyarakat telah membangun Lembaga Pendidikan berupa 2 (dua) buah Taman Kanak-Kanak (TK), 1 (satu) buah Sekolah Dasar (SD), 2 (dua) buah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan 1 (satu) buah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pelaksanaan pendidikan adalah dengan sistem guru kelas sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik.

Tabel. IV.3: Sarana Pendidikan Desa Api-Api

No	Sarana Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	2	33,33%
2	Sekolah Dasar (SD)	1	16,67%
3	Madrasah Dinayah Awaliyah (MDA)	2	33,33%
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1	16,67%
Jumlah		6	100%

Sumber : Monografi Desa Api-Api tahun 2011

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Api-Api dapat dikatakan masih jauh tertinggal dalam hal pendidikan bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain se-Kecamatan Bengkalis. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. IV.4: Pendidikan Masyarakat Desa Api-Api

No	Tingkat pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Belum Sekolah	185	12,75%
2	Sekolah Dasar/Sederajat	710	48,93%
3	SLTP/Sederajat	133	9,17%
4	SLTA/ Sederajat	111	7,50%
5	Pondok Pesantren	15	1,03%
6	Madrasah Diniyah Awaliyah	50	3,45%
7	Perguruan Tinggi	41	2,83%
8	Tidak Sekolah	207	14,27%
Jumlah		1.451	100%

Sumber : Monografi Desa Api-Api 2011

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa tingkat Sekolah Dasar (SD)/Sederajat lebih mendominasi, yaitu berjumlah 710 orang atau (48,93%). Sedangkan urutan kedua diikuti oleh yang tidak bersekolah yaitu 207 orang atau (14,27%), urutan ketiga yaitu yang belum bersekolah berjumlah 185 orang atau (12,75%), selanjutnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Sederajat yaitu berjumlah 133 orang atau (9,17%), diikuti oleh Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sederajat berjumlah 111 orang atau (7,50%), kemudian tingkat Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) berjumlah 50 orang atau (3,45%), Perguruan tinggi berjumlah 41 orang atau (2,83%), sedangkan yang paling sedikit jumlahnya adalah pondok Pesantren sebanyak 15 orang atau (1,03%).

Dari tabel di atas dapatlah kita simpulkan bahwa masyarakat di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis masih jauh tertinggal di bidang pendidikannya.

2. Agama

Agama merupakan pedoman hidup bagi manusia, karena tanpa agama manusia hidupnya tak ubah seperti makhluk Tuhan yaitu hewan. Di masyarakat Desa Api-Api mayoritas penduduknya beragama islam, dan itu terlihat jalannya kehidupan agama dengan baik, walaupun tidak seperti dulunya sewaktu azan dikumandangkan di masjid maupun mushalla orang berbondong-bondong untuk pergi shalat berjamaah bersama-sama dan mereka tidak lupa untuk saling mengingatkan diantara sesama mereka, sehingga nampaklah besemaraknya kehidupan beragama di Desa Api-Api.

Namun jika dilihat pada saat sekarang ini sewaktu azan dikumandangkan, baik di masjid maupun di mushalla orang-orang masih pada dijalan dan dirumah mereka masing-masing. Namun jika kita lihat dari sarana dan prasarana ibadahnya cukup bagus sekali, namun yang berjamaah hanya orang tua-tua yang memang sudah lanjut usianya.

Untuk lebih jelasnya tentang sarana ibadah Desa Api-Api dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel. IV.V: Jumlah Sarana Ibadah Desa Api-Api

No	Sarana Ibadah	Frekuensi	Persentase
1	Masjid	2	40%
2	Mushalla	3	60%
Jumlah		5	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Api-Api tahun 2011.

4.E. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa Api-Api

1. Sejarah Singkat Berdirinya Badan Permusyawaratan Desa Api-Api

Setelah lahirnya UU No. 32 tahun 2004, PP No. 72 tahun 2005 bahwa BPD adalah badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Organisasi Sosial Politik, Pemuka Agama, Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya. Undang-undang tersebut menyebutkan adanya institusi politik lokal tingkat desa yang disebut dengan badan permusyawaratan desa (BPD). Untuk BPD di Desa Api-Api terbentuk sesuai dengan dikeluarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bengkalis No. 18 tahun 2000 tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Selanjutnya setelah dikeluarkan Perda Kabupaten Bengkalis No. 18 tahun 2000 tentang pedoman pembentukan BPD maka pemerintahan daerah Kabupaten Bengkalis melalui pemberdayaan masyarakat desa (PMD) yang selanjutnya melalui Camat Bukit Batu mengintruksikan kepada Kepala Desa agar dapat membentuk BPD Desa Api-Api. Sejalan dengan hal itu maka Kepala Desa Api-Api melakukan rapat desa yang membahas tentang pembentukan BPD Desa Api-Api sehingga terbentuklah kepanitiaan untuk pemilihan BPD Desa Api-Api tersebut. Pemilihan anggota BPD oleh masyarakat dari masing-masing 3 dusun yaitu: Dusun Mekar Sari, Dusun Sejahtera, dan Dusun Lang Buana memilih perwakilan yang menjadi anggota BPD.

Pada tanggal 4 Maret 2002 pemerintah Kabupaten Bengkalis membuat keputusan No. 42 tahun 2002 tentang pengesahan BPD. Hasil pemilihan Kecamatan Bukit Batu tahun 2002 berdasarkan keputusan Bupati Bengkalis tersebut maka terbentuk setelah dilakukan pemilihan masyarakat desa.

2. Struktur Organisasi BPD di Desa Api-Api

Pelaksanaan fungsi BPD terletak pada daya dukung anggota didalamnya atau mekanisme yang ada sehingga dengan itu sejumlah alat perlengkapan telah diadakan. Struktur organisasi BPD yang didasari oleh Perda Kabupaten Bengkalis No. 06 tahun 2004, yaitu pimpinan BPD, sekretaris, atau anggota-anggotanya.

3. Tata kerja BPD di Desa Api-Api

a. Pimpinan BPD

Pimpinan BPD berbeda dengan kedudukan Kepala Desa dan beberapa organisasi lainnya maka pimpinan BPD menurut Perda Kabupaten Bengkalis No. 06 tahun 2004 adalah dipilih oleh dan anggota BPD itu sendiri dan disahkan oleh Bupati, perlu diketahui tugas pimpinan BPD ditetapkan dalam keputusan pimpinan BPD, adapun tugas dan kewajiban BPD sebagai berikut:

1. Membantu panitia pemilihan kepala desa;
2. Menetapkan calon terpilih kepala desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
4. Memberi persetujuan atas terpilihnya atau pengangkatan perangkat desa;
5. Memberikan pertimbangan terhadap pembentukan penghapusan atau penggabungan atau perubahan status desa menjadi kelurahan;
6. Melakukan pengawasan atas jalannya Pemerintahan Desa;
7. Menerima dan menolak pertanggungjawaban yang diberikan Kepala Desa;
8. Bersama dengan kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa);
9. Memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhir masa jabatan kepala desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
10. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa;

11. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap perjanjian pihak ketiga.

Pimpinan BPD ini sebanyak-banyaknya dua orang yang terdiri dari seorang ketua dan satu orang wakil ketua. Tetapi sebelum BPD memiliki ketua dan wakil ketua dimaksud, maka rapat sementara dipimpin oleh anggota yang usianya paling tua diantara anggota BPD tersebut.

b. Sekretaris BPD

Sekretaris BPD sebagai alat perlengkapan BPD dibentuk pada Peraturan Daerah itu sendiri, sekretaris BPD yang mana dimaksud dalam ayat 2 pasal 27 tahun 2008 Perda Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh seorang sekretaris BPD dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan yang diangkat oleh pemerintah desa atas persetujuan pimpinan BPD dan bukan dari perangkat desa, sekretaris BPD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan BPD dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya pimpinan BPD dibantu oleh sekretaris BPD.

Untuk mengembangkan otonomi dan perwujudan demokrasi pancasila di desa, dibentuk BPD dan juga anggota BPD dipilih dari penduduk desa dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, pemuka masyarakat dan yang memenuhi persyaratan. Dalam strukturisasi keorganisasian BPD dibentuk pula oleh anggota merupakan alat perlengkapan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada permulaan pelaksanaan tingkatnya.

Secara umum tugas dan kewajiban BPD adalah:

1. Membentuk sekretaris sesuai dengan kebutuhan, yang diangkat oleh pemerintah desa atas persetujuan pimpinan BPD dan bertanggungjawab kepada pimpinan BPD;
 2. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Mengamalkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 4. Membina demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintah desa;
 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 6. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi atau disampaikan kepada pejabat dan instansi berwenang untuk ditindak lanjuti penyelesaiannya;
 7. Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat desa.
- c. Komisi A (komisi pembangunan) memiliki tugas mengawasi pembangunan di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, serta mengusulkan pembangunan Desa Api-Api.
 - d. Komisi B (komisi kemasyarakatan) memiliki tugas menampung aspirasi masyarakat, dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesenian, budaya serta adat istiadat.
 - e. Komisi C (komisi pemerintahan) memiliki tugas mengawasi kinerja Kepala Desa dan perangkat desa, dan melaksanakan program yang dicanangkan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

Pemilihan oleh Pemerintahan Desa bersama-sama dengan pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan yang dilakukan melalui musyawarah atau mufakat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

1. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat.
2. Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota;
 - e. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Panitia pemilihan ini mempunyai tugas yaitu:
 - a. Menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD;
 - b. Melakukan penelitian persyaratan bakal calon BPD;
 - c. Melaksanakan pendaftaran pemilihan dan pengarahannya sementara maupun tetap tetap memilih;
 - d. Menetapkan nama-nama calon anggota BPD yang berhak dipilih;
 - e. Menetapkan besarnya biaya pemilihan;
 - f. Melaksanakan pemilihan calon anggota BPD;
 - g. Membuat berita acara pemilihan calon anggota BPD dan melaporkan kepada bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis atau melalui sarana komunikasi lainnya sesuai dengan setuasi dan kondisi desa yang bersangkutan tentang kekosongan keanggotaan BPD dan bakal calon anggota BPD yang diajukan oleh pemuka adat, tokoh agama, tokoh masyarakat pada penitia pemilihan.

Untuk BPD di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

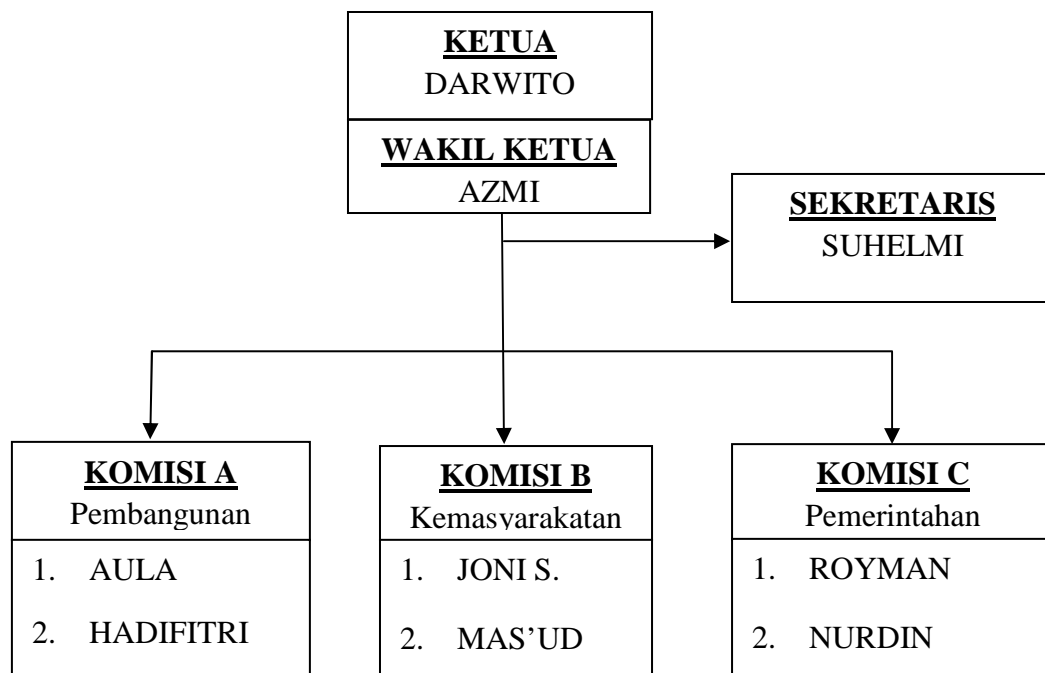
1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris rangkap Bendahara;
4. Komisi A Bidang Pembangunan;
5. Komisi B Bidang Kemasyarakatan;
6. Komisi C Bidang Pemerintahan.

Setelah struktur organisasi disusun disetiap organisasi, maka untuk selanjutnya akan digambarkan melalui bagan. William Grant Ireson dalam buku terjemahan Sutarto (2000: 202) mengatakan bahwa bagan organisasi akan menunjukan bagaimana informasi mengalir dari suatu organisasi yang satu dengan yang lain, tingkat tanggungjawab dari mana informasi berasal dan tempat tujuan terakhir.

Sedangkan Lyman A. Keath dan Carlo E. Gubllini dalam buku terjemahan Sukarto (2000: 211) mengatakan bahwa pembuatan bagan adalah suatu yang

membantu dalam memberikan penggambaran dan perencanaan suatu organisasi hal itu tidak memecahkan masalah organisasi.

Bagan I: Bagan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Priode 2008-2012



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.A. Identitas Responden

Untuk mendukung keobjektifan dan akuratnya data dalam penelitian yang berhubungan dengan fungsi BPD, maka perlu disajikan identitas responden dari unsur anggota BPD, aparat desa, dan masyarakat yang menyangkut tingkat pendidikan, tingkat umur dan jenis pekerjaan sehingga dengan penjabaran identitas dapat mempermudah proses penelitian sekaligus tingkat pemahaman respondennya.

Secara umum telah diketahui bahwa pendidikan selalu menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas hidup dan kehidupan manusia, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan yang tinggi karena sudah kodratnya manusia menginginkan kualitas terbaik dari setiap pelaksanaan kegiatan atau tugasnya.

Implikasinya sangat jelas, kebutuhan akan pendidikan terus meningkat seiring dengan perubahan dan kemajuan zaman, sehingga tanpa pendidikan yang layak seorang individu akan tertinggal demikian juga dengan anggota BPD di Desa Api-Api yang menyampaikan aspirasi masyarakat. Di Desa Api-Api pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dan berperan penting dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk lebih jelas tentang pendidikan anggota BPD, aparat desa, dan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. V.1: Tingkat Pendidikan Responden BPD

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SLTP/Sederajat	-	-
2.	SLTA/Sederajat	9	100%
3.	Diploma	-	-
4.	Sarjana	-	-
	Jumlah	9	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa yang dijadikan responden dalam penelitian ini terdiri dari tamatan SLTP dengan jumlah tidak ada atau (0%), tamatan SLTA berjumlah 9 orang atau (100%), kemudian responden dari jenjang pendidikan Diploma berjumlah tidak ada atau (0%), serta tamatan perguruan tinggi atau Sarjana berjumlah tidak ada atau (0%).

Mengingat jumlah anggota BPD dan aparat desa sedikit penulis mengambil seluruh populasi sebagai sampel sehingga mempermudah penulis dalam mendapatkan sumber data yang lebih akurat. Setidaknya membuat hasil penyebaran angket penelitian penulis sedikit lebih sempurna.

Kemudian untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden penelitian dari aparat desa di Desa Api-Api, dapat dilihat berikut ini:

Tabel. V.2: Tingkat Pendidikan Responden Aparat Desa

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SLTP/Sederajat	-	-
2.	SLTA/Sederajat	19	95%
3.	Diploma	1	5%
4.	Sarjana	-	-
	Jumlah	20	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa yang dijadikan responden dalam penelitian ini terdiri dari tamatan SLTP/Sederajat berjumlah tidak ada atau (0%), tamatan SLTA/Sederajat berjumlah 19 orang atau (95%), sedangkan tamatan Diploma berjumlah 1 orang atau (5%), dan untuk tamatan sarjana srata satu (S1) sendiri berjumlah tidak ada atau (0%).

Setelah penulis amati dari tingkat pendidikan responden, maka penulis mulai mengerti permasalahan awal kenapa roda pemerintahan desa di Desa Api-Api belum berjalan secara optimal, karna tingkat pendidikannya tergolong sangat rendah sekali dimana tamatan perguruan tinggi yang srata satu tidak ada sama sekali dan di ikuti dengan tamatan diploma hanya 1 orang, sedangkan rata-rata tamatan SLTA/Sederajat.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden penelitian yang berasal dari masyarakat desa di Desa Api-Api, dapat dilihat berikut ini:

Tabel. V.3: Tingkat Pendidikan Responden Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Tamat SD/Sederajat	5	5,68%
2.	SLTP/Sederajat	14	15,90%
3.	SLTA/Sederajat	46	52,27%
4.	Diploma	8	9,10%
5.	Sarjana	15	17,05%
	Jumlah	88	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa yang dijadikan responden dalam penelitian ini terdiri dari tamatan SD/Sederajat berjumlah 5 orang atau (5,68%), tamatan SLTP/Sederajat berjumlah 14 orang atau (15,90%), untuk tamatan SLTA/Sederajat berjumlah 46 orang atau (52,27%), selanjutnya untuk tamatan Diploma berjumlah 8 orang atau (9,10%), dan untuk tamatan sarjana srata satu (S1) sendiri berjumlah 15 orang atau (17,05%).

5.B. Fungsi BPD di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Salah satu fungsi BPD teridentifikasi sebagai lembaga legislatif desa adalah fungsi aspiratif yang selalu melekat pada diri BPD, yang ekstensinya tidak akan terlepas dari menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Desa Api-Api. Sehingga mampu tidaknya BPD dalam melaksanakan fungsi dan tugas serta tanggungjawabnya akan terlihat pada usaha BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut.

Dengan demikian, keberhasilan BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat akan berimplikasi keberhasilan BPD menjalankan fungsi aspirasinya, karena fungsi itu sendiri merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab yang harus dijalankan oleh BPD dalam pencapaian tujuan secara maksimal yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu, dalam melihat sejauh mana fungsi BPD dalam melaksanakan fungsi-fungsinya pada uraian berikut dapat dijelaskan lebih lengkap.

5.B.1. Pengawasan

pengawasan merupakan suatu proses pemantauan dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam pencapaian tujuan yang optimal. Dalam pengawasan sering dijumpai kelemahan dan kekurangan, bahkan terjadi kesalahan-kesalahan. Maka dari

itu, janganlah kekurangan dan kelemahan serta kesalahan itu ditutup-tutupi sehingga menyulitkan orang lain dalam pekerjaannya.

BPD diberikan untuk mengawasi jalannya peraturan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kegiatan pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, secara langsung mengawasi terhadap objeknya dan apabila dijumpai hal-hal yang tidak serasi langsung dapat diberikan teguran. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung merupakan kegiatan pengawasan tidak secara langsung kepada objeknya, tetapi memperhatikan pada hasil yang diselesaikan dan atau pengaruh yang diakibatkannya.

Kegiatan pengawasan yang harus dilakukan oleh anggota BPD ialah menilai kinerja pemerintah desa apakah sudah sesuai dengan perencanaan masing-masing indikator yang menjadi objek pengawasan. Dari penilaian tersebut nantinya akan diketahui apakah pelaksanaan perencanaan pemerintah desa tersebut sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan bersama.

Oleh karena itu, dalam hal pengawasan ini banyak cara yang dapat dilakukan oleh lembaga legislatif mini ini sehingga pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya tidak sendiri, namun ada lembaga lain yang berfungsi sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing yang salah satunya adalah BPD sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, bahwa pengawasan yang selama ini yang dilakukan oleh BPD tidak terlihat sedikitpun. Contoh studi kasus ketidakmampuan pemerintahan desa dalam menggunakan anggaran ADD tentu saja

membuat banyak masyarakat di Desa Api-Api merasa kecewa atas kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintahan desa. Masyarakat berharap dengan adanya bantuan yang diberi oleh pemerintah daerah bisa digunakan dengan sebaik mungkin namun kenyataan yang terjadi malah sebaliknya.

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Desa Api-Api dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel. V.4: Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Terhadap Peraturan Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	sangat baik	4	3,42%
	baik	2	1,70%
	cukup baik	3	2,56%
	kurang baik	-	0%
	tidak baik	-	0%
Aparat desa	sangat baik	-	0%
	baik	5	4,27%
	cukup baik	12	10,25%
	kurang baik	3	2,56%
	tidak baik	-	0%
Masyarakat	sangat baik	-	0%
	baik	1	0,85%
	cukup baik	9	7,69%
	kurang baik	26	22,22%
	tidak baik	52	44,44%
Jumlah		117	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari BPD responden yang pernah melakukan pengawasan terhadap peraturan desa yang menjawab sangat baik berjumlah 4 orang atau (3,42%), yang menjawab melakukan dengan baik berjumlah 2

orang atau (1,70%), selanjutnya yang menjawab cukup baik berjumlah 3 orang atau (2,56%), dan yang menjawab kurang baik berjumlah tidak ada atau (0%), serta jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Selanjutnya responden yang berasal dari aparat desa yang pernah melakukan pengawasan terhadap peraturan desa yang menjawab dengan sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), yang menjawab baik berjumlah 5 orang atau (4,27%), jawaban aparat desa yang menjawab cukup baik berjumlah 12 atau (10,25%), dan yang memilih jawaban kurang baik berjumlah 3 orang atau (2,56%), serta yang memilih jawaban yang tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Dan yang terakhir dari masyarakat dimana responden dari masyarakat yang menjawab sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), yang menjawab baik berjumlah 1 orang atau (0,85%), selanjutnya yang menjawab cukup baik berjumlah 9 orang atau (7,69%), dan yang menjawab kurang baik berjumlah 26 orang atau (22,22%), serta yang menjawab tidak baik berjumlah 52 orang atau (44,44%).

Dalam hal pengawasan terhadap peraturan desa, masyarakat lebih banyak memilih jawaban tidak baik yaitu berjumlah 52 orang atau (44,44%), hal ini menandakan masyarakat tidak ikut berberperan aktif atau lebih cenderung bersikap acuh tidak acuh terhadap peraturan desa yang dibuat oleh BPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Api-Api pada tanggal 12 Januari 2011 yaitu Bapak Khairil Anwar mengatakan:

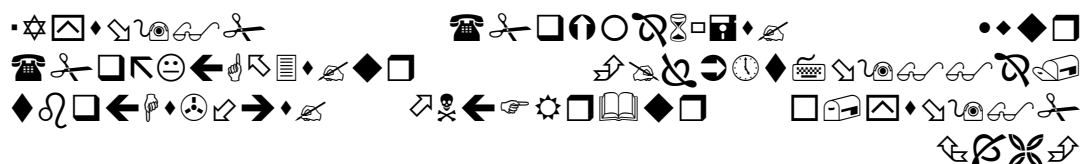
“Dalam mengawasi peraturan desa dikampung ini bisa dikatakan kurang mendapat dukungan kerjasama dari pemerintahan desa itu sendiri, apalagi dari

masyarakat. Mereka selalu beranggapan bahwa peraturan desa yang sudah dibuat bukan sebuah aturan yang perlu diikuti serta ditakuti seperti undang-undang dan peraturan pemerintah serta peraturan daerah, dengan anggapan mereka bahwa sekedar pormalitas saja”orang lain buat kita juga buat sajalah biar sama dengan desa-desa lain”, bapak Khairil meniru logat bicara mereka”.

Sedangkan hasil dari wawancara dengan ketua BPD Desa Api-Api, bahwa mereka mengatakan sudah melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dengan sangat baik, berikut pernyataan ketua BPD “Saya beserta anggota telah melakukan pengwasan dengan sangat baik walaupun kadang-kadang ada sedikit permasalahan-permasalahan dengan aparat desa itukan biasa dalam bekerja”.

Apabila kita lihat secara kasat mata bahwa, diantara kedua belah pihak yaitu antara Kepala Desa dengan BPD saling memberikan keterangan yang bisa dianggap mengikuti ego masing-masing sehingga permasalahan yang terjadi di pemerintahan desa semakin bertambah besar. Yang benar dikatakan salah yang salah dikatakan benar. Disinilah letak kenapa pemerintahan desa di Desa Api-Api khususnya BPD belum berjalan dengan baik atau belum optimal dikarenakan Kepala Desa dengan BPD kurang berkoordinasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat (Al-Baqarah ayat 42) yang berbunyi:



Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah ayat 42).

Tabel. V.5: Tanggapan Responden Tentang Adanya Keputusan Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	sangat baik	4	3,42%
	baik	2	1,71%
	cukup baik	3	2,56%
	kurang baik	-	0%
	tidak baik	-	0%
Aparat desa	sangat baik	-	0%
	baik	6	5,13%
	cukup baik	10	8,55%
	kurang baik	3	2,56%
	tidak baik	1	0,85%
Masyarakat	sangat baik	-	0%
	baik	2	1,71%
	cukup baik	12	10,26%
	kurang baik	56	48%
	tidak baik	18	15,38%
Jumlah		117	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari BPD responden yang memilih jawaban sangat baik berjumlah 4 orang atau (3,42%), yang memilih jawaban baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), selanjutnya yang memilih jawaban cukup baik berjumlah 3 orang atau (2,56%), dan yang memilih jawaban kurang baik berjumlah tidak ada atau (0%), serta memilih jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%).

Selanjutnya responden yang berasal dari aparat desa yang memilih jawaban sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), memilih jawaban baik berjumlah 6 orang atau (5,13%), yang memilih jawaban cukup baik berjumlah 10 orang atau (8,55%), dan memilih jawaban kurang baik berjumlah 3 orang atau (2,56%), serta memilih jawaban tidak baik berjumlah 1 orang atau (0,85%). Dan yang terakhir dari masyarakat dimana responden dari masyarakat memilih jawaban sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), memilih jawaban baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), selanjutnya yang menjawab cukup baik berjumlah 12 orang atau (10,26%), dan yang memilih jawaban kurang baik berjumlah 56 orang atau (48%), serta yang menjawab tidak baik berjumlah 18 orang atau (15,38%).

Dengan demikian jelaslah bahwa implementasi dari keputusan desa sangatlah tidak berjalan secara optimal, ditandai dengan banyaknya jawaban responden lebih memilih jawaban cukup baik dan kurang baik, yaitu dari aparat desa berjumlah 10 orang atau (8,55%) yang menjawab cukup baik dan terakhir dari responden masyarakat memilih jawaban kurang baik berjumlah 56 orang atau (48%).

Pemerintah desa yang selama ini bisa dikatakan sudah terbentuk sejak lama tentu saja sudah memiliki dan pernah membuat keputusan-keputusan Kepala Desa. Namun kenyataannya keputusan itu tidaklah menjadi sebuah acuan serta pedoman buat masyarakat desa dalam membantu membangun desa yang berkualitas sehingga bisa menyaingi desa-desa lainnya tetapi malah menjadi bahan cemoah dimana keputusan-keputusan itu tidaklah dibuat berdasarkan asil keputusan bersama antara

Kepala Desa dan BPD melainkan atas suka-suka Kepala Desa, inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidak harmonisan antara BPD dengan aparat desa.

Tabel. V.6: Tanggapan Responden Tentang Pengawasan BPD Tentang Keputusan Desa Yang di Buat Oleh Kepala Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	sangat baik	5	4,27%
	baik	2	1,71%
	cukup baik	2	1,71%
	kurang baik	-	0%
	tidak baik	-	0%
Aparat desa	sangat baik	-	0%
	baik	9	7,69%
	cukup baik	4	3,42%
	kurang baik	6	5,13%
	tidak baik	1	0,85%
Masyarakat	sangat baik	-	0%
	baik	6	5,13%
	cukup baik	14	12%
	kurang baik	28	23%
	tidak baik	40	34,18%
Jumlah		117	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari BPD responden yang pernah melakukan pengawasan terhadap peraturan desa yang dibuat oleh kepala desa lebih banyak memilih jawaban sangat baik yaitu berjumlah 5 orang atau (4,27%), sedangkan yang memilih jawaban baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), selanjutnya memilih jawaban cukup baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), yang menjawab cukup baik berjumlah tidak ada atau (0%), yang menjawab kurang baik berjumlah tidak ada atau (0%), serta memilih jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%).

Selanjutnya responden yang berasal dari aparat desa yang memilih jawaban sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), memilih jawaban baik berjumlah tidak ada atau (0%), yang memilih jawaban cukup baik berjumlah 9 orang atau (7,69%), dan memilih jawaban kurang baik berjumlah 4 orang atau (3,42%), serta memilih jawaban tidak baik berjumlah 6 orang atau (5,13%). Dan yang terakhir dari masyarakat dimana responden dari masyarakat memilih jawaban sangat baik berjumlah tidak ada atau (0,85%), menjawab baik berjumlah 6 orang atau (5,13%), selanjutnya yang menjawab cukup baik berjumlah 14 orang atau (12%), dan yang menjawab kurang baik berjumlah 28 orang atau (23%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah 40 orang atau (34%).

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga yaitu bapak Suprianto dirumahnya, beliau mengatakan sebagai berikut “Pengawasan BPD terhadap keputusan desa yang dibuat oleh Kepala Desa bisa dibilang tidak ada, apa lagi diantara ketua BPD dengan Kepala Desa tidak sepaham dalam membina dan menjalankan pemerintahan di desa ini semuanya menganggap dirinya masing-masing benar”.

Dilihat dari hasil jawaban responden dan wawancara mengenai bagaimanakah pengawasan yang BPD lakukan terhadap peraturan desa yang dibuat oleh Kepala Desa, penulis menemui jawaban yang sangat kuat kebenarannya sesuai kenyataan yang penulis temukan di lapangan, bahwa pengawasan yang dilakukan BPD benar-benar tidak baik atau tidak optimal sesuai keinginan.

Tabel. V.7: Tanggapan Responden Terhadap Berjalannya Fungsi Pengawasan BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	sangat baik	1	0,85%
	baik	7	5,98%
	cukup baik	1	0,85%
	kurang baik	-	0%
	tidak baik	-	0%
Aparat desa	sangat baik	2	1,71%
	baik	2	1,71%
	cukup baik	4	3,42%
	kurang baik	12	10,26%
	tidak baik	-	0%
Masyarakat	sangat baik	-	0%
	baik	20	17,09%
	cukup baik	15	12,82%
	kurang baik	40	34,18%
	tidak baik	12	10,26%
Jumlah		117	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari BPD responden yang memilih jawaban sangat baik berjumlah 1 orang atau (0,85%), yang memilih jawaban baik berjumlah 7 orang atau (5,98%), selanjutnya yang memilih jawaban cukup baik berjumlah 1 orang atau (0,85%), dan yang menjawab kurang baik berjumlah tidak ada atau (0%), serta memilih jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Selanjutnya responden yang berasal dari aparat desa yang memilih jawaban sangat baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), memilih jawaban baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), memilih jawaban cukup baik berjumlah 4 orang atau (3,42%), yang memilih jawaban kurang baik berjumlah 12 orang atau (10,26%), serta yang memilih

jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Dan yang terakhir dari masyarakat dimana responden dari masyarakat memilih jawab sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), memilih jawab baik berjumlah 20 orang atau (17,09%), selanjutnya yang menjawab cukup baik berjumlah 15 orang atau (12,82%), yang memilih jawaban kurang baik berjumlah 40 orang atau (35,18%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah 12 orang atau (10,26%).

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga yaitu bapak Andrianto di kediamannya, beliau mengatakan bahwa “Desa Api-Api ini pemerintahan desanya sangat tidak jelas, baik itu berupa kinerjanya, pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan peran aktifnya terhadap pembangunan desa termasuk salah satunya fungsi pengawasannya itu benar-benar tidak tampak. Apakah mereka tidak tahu peranan BPD ataupun tidak mau tahu”.

5.B.2. Legislasi

Fungsi dari legislasi dari BPD adalah merumuskan dan menerapkan peraturan desa atau disebut juga dengan nama lain. Fungsi legislasi yakni merumuskan dan menetapkan peraturan desa menurut pasal 48 Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 46 tahun 1999, bahwa: ayat (1) rancangan peraturan desa disusun oleh Kepala Desa atau BPD, ayat (2) Kepala Desa menetapkan peraturan desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Dengan demikian, fungsi BPD hampir sama dengan DPRD untuk tingkat Kabupaten dan Provinsi yang berfungsi sebagai pemberi persetujuan terhadap peraturan desa yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Oleh karena BPD memiliki peran penting dan tanggungjawab yang besar dalam menentukan peraturan desa, maka anggota BPD harus mempelajari, memahami, menganalisa, dan mempertimbangkan secara matang tentang peraturan desa yang disetujui tersebut, untuk itu setiap anggota BPD harus menyampaikan segala kepentingan pribadi, kelompok, dan pihak-pihak tertentu dalam persetujuan peraturan desa.

fungsi BPD yang mencirikan demokrasi modern ini memperkenalkan nama badan legislatif atau pembuat undang-undang. Melalui fungsi ini parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya dalam pasal-pasal yang dihasilkan dalam waktu bersamaan, parlemen juga sebagai unsur pemerintah atau memberi dukungan kepada eksekutif dan yudikatif sebagai lembaga pemerintah selain dirinya melalui kewenangan mengatur masyarakat yang dikandung oleh pasal-pasal serta undang-undang yang sama.

Begitu juga BPD, dimana lembaga ini memiliki wewenang membuat peraturan desa bersama Kepala Desa yang nantinya akan menghasilkan peraturan desa. Sehubungan dengan itu untuk mengetahui sejauh mana fungsi BPD sebagai lembaga yang merumuskan serta menetapkan peraturan Desa Api-Api dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel. V.8: Tanggapan Responden Tentang Peraturan Desa Yang Dibuat BPD Dan Kepala Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	sangat baik	1	0,85%
	baik	3	2,56%
	cukup baik	5	4,27%
	kurang baik	-	0%
	tidak baik	-	0%
Aparat desa	sangat baik	4	3,42%
	baik	4	3,42%
	cukup baik	1	0,85%
	kurang baik	10	8,55%
	tidak baik	1	0,85%
Masyarakat	sangat baik	-	0%
	baik	13	11,11%
	cukup baik	25	21,36%
	kurang baik	37	31,62%
	tidak baik	13	11,11%
Jumlah		117	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari BPD responden yang memilih jawaban sangat baik berjumlah 1 orang atau (0,85%), yang memilih jawaban baik berjumlah 3 orang atau (2,56%), selanjutnya yang memilih jawaban cukup baik berjumlah 5 orang atau (4,27%), dan yang memilih jawaban kurang baik berjumlah tidak ada atau (0%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Selanjutnya responden yang berasal dari aparat desa yang memilih jawaban sangat baik berjumlah 4 orang atau (3,42%), memilih jawaban baik berjumlah 4 orang atau (3,42%), memilih jawaban cukup baik berjumlah 1 orang atau (0,85%),

serta yang memilih jawaban kurang baik berjumlah 10 orang atau (8,55%), serta jawaban tidak baik berjumlah 1 orang atau (0,85%). Dan yang terakhir dari masyarakat dimana responden dari masyarakat yang memilih jawaban sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), memilih jawaban baik berjumlah 13 orang atau (11,11%), selanjutnya yang menjawab cukup baik berjumlah 25 orang atau (21,36%), menjawab kurang baik berjumlah 32 orang atau (31,62%), serta yang menjawab tidak baik berjumlah 13 orang atau (11,11%).

Dari data responden di atas dapat dilihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan desa yang telah dibuat oleh BPD dan Kepala Desa. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang menjawab kurang baik yaitu berjumlah 32 orang atau (31,62%).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asparuddin yang merupakan salah satu penduduk di Desa Api-Api mengatakan:

“BPD dan Kepala Desa membuat peraturan desa kadang-kadang mereka itu sendiri yang tidak tahu dengan peraturan yang sudah mereka buat, apa lagi masyarakat, tambah tidak tahu. Perangkat desa disini bekerja sesuka hati mereka tanpa ada sosialisasi baik berupa sosialisasi jabatan, pembagian tugas/kerja yang jelas dan lain-lainnya sehingga tidak jelas keberadaan mereka”.

Studi kasus yang pernah penulis jumpai beberapa bulan terakhir yang bertepatan pada bulan September tahun 2010, yaitu BPD dan Kepala Desa sempat terjadi konflik. Konflik yang terjadi antara Kepala Desa dan BPD kebanyakan adalah dalam bentuk perbedaan pendapat, kepentingan, ide dan interpretasi (pemahaman). Konflik antara Kepala Desa dan BPD di Desa Api-Api dalam bentuk perbedaan

pendapat yang terjadi pada saat rapat-rapat koordinasi dengan BPD atau saat merumuskan Peraturan Desa. Sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan selama ini antara Kepala Desa dan BPD dalam hal pikiran atau ide, semua tetap berjalan dengan baik dan lancar, dan tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan desa. Mungkin hanya pada satu kasus yang membuat jalannya roda pemerintahan desa agak terganggu, yaitu pada saat penentuan Pjs Sekretaris Desa, yang membuat masyarakat Desa Api-Api maupun masyarakat lainnya bingung karena terdapat dualisme.

Masyarakat di Desa Api-Api apabila ditanya apakah saudara tahu bagaimana caranya membuat peraturan desa? Semuanya menjawab tidak tahu, apabila ditanya alasannya mereka menjawab bahwa kami tidak mau tahu mau ada peraturan atau tidak di desa ini lantaklah, adapun peraturan desa yang dibuat aparat desa sebagai pemerintahan yang ada di desa ini tidak juga menunjuk contoh yang baik. Setelah penulis selidiki rupanya inilah salah satu alasan mengapa masyarakat tidak tahu bagaimana caranya dan prosedur tentang pembuatan peraturan desa dikarenakan mereka tidak pernah mau menghadiri atau mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh BPD maupun Kepala Desa. Contoh kasus pada Peraturan Desa Api-Api No. 10 tahun 2009 tentang penggunaan alokasi dana desa (ADD) dimana yang terdapat dalam pasal 1 dan 2 yang mengatakan bahwa BPD dan Kepala Desa merupakan mitra sejajar dalam pemerintahan desa dan harus menumbuh kembangkan pembangunan desa dengan sumber daya yang ada terutama dengan adanya sokongan alokasi dana desa (ADD) yang telah disalurkan oleh pemerintah daerah ke tiap-tiap

desa dan kelurahan, Perdes ini mengacu pada Perda Kabupaten Bengkalis No. 04 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

Berikut hasil penyebaran angket penelitian yang penulis lakukan di Desa Api-Api kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

Tabel. V.9: Tanggapan Responden Tentang Cara Pembuatan Peraturan Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	sangat baik	2	1,71%
	baik	4	3,41%
	cukup baik	3	2,56%
	kurang baik	-	0%
	tidak baik	-	0%
Aparat desa	sangat baik	3	2,56%
	baik	-	0%
	cukup baik	7	5,98%
	kurang baik	9	7,69%
	tidak baik	1	0,85%
Masyarakat	sangat baik	-	0%
	baik	17	14,53%
	cukup baik	18	15,38%
	kurang baik	22	18,80%
	tidak baik	31	26,49%
Jumlah		117	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari BPD responden yang memilih jawaban sangat baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), yang memilih jawaban baik berjumlah 4 orang atau (3,41%), selanjutnya memilih jawaban cukup baik berjumlah

3 orang atau (2,56%), yang memilih jawaban kurang baik berjumlah tidak ada atau (0%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Selanjutnya responden yang berasal dari aparat desa yang lebih memilih untuk menjawab sangat baik berjumlah 3 orang atau (2,56%), memilih jawaban baik berjumlah tidak ada atau (0%), memilih jawaban cukup baik berjumlah 7 orang atau (5,98%), dan memilih jawaban kurang baik berjumlah 9 orang atau (7,69%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah 1 orang atau (0,85%). Dan yang terakhir dari masyarakat dimana responden dari masyarakat memilih jawaban sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), memilih jawaban baik berjumlah 17 orang atau (14,53%), selanjutnya yang memilih jawaban cukup baik berjumlah 18 orang atau (15,38%), dan yang menjawab kurang baik berjumlah 22 orang atau (18,80%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah 31 orang atau (26,19%).

Disini jelas bahwa keberadaan BPD belum berdampak secara maksimal dalam memberikan pelayanan atau kontribusi kepada masyarakat di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

Menurut hasil penelitian penulis di lapangan mengenai keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat yang dibuat oleh Kepala Desa dan BPD ternyata masyarakat desa Api-Api sudah mulai tidak mau tahu lagi ini terbukti dengan hasil yang penulis dapat dari tempat penelitian yaitu daftar hadir rapat koordinasi desa pada tanggal 10 Maret 2010, rapat persiapan menghadapi HUT RI tanggal 12

Agustus 2010, seta rapat masalah pembentukan pos ronda tanggal 04 Januari 2011.

Berikut tabel dari rapat-rapat yang pernah diadakan oleh BPD dan Kepala Desa:

Tabel V.10: Absensi Rapat Koordinasi Tanggal 10 Maret 2010

No	Undangan	Hadir	Tidak Hadir
1	Anggota BPD	4	5
2	Aparat Desa	7	13
3	Masyarakat	12	20
Jumlah		23	38

Sumber: Ketua BPD Desa Api-API Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa peran aktif dari aparat desa, anggota BPD, dan masyarakat sangat kecil dalam pembangunan desa pada masa yang akan datang. Ini terbukti dari 61 undangan yang hadir hanya 23 orang yang terdiri dari Anggota BPD sebanyak 4 orang, aparat desa berjumlah 7 orang, dan masyarakat berjumlah 12 orang dari 32 orang yang turut diundang.

Tabel. V.11: Rapat Persiapan Menghadapi HUT RI Tanggal 12 Agustus 2010

No.	Undangan	Hadir	Tidak hadir	Total
1.	Anggota BPD	2	7	9
2.	Aparat Desa	5	10	20
3.	Masyarakat	8	12	20
Jumlah		15	29	49

Sumber: Ketua BPD Desa Api-API Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa peran aktif dari aparat desa, anggota BPD, dan masyarakat sangat kecil dalam mengikuti rapat-rapat desa. Ini terbukti dari 49 undangan yang hadir hanya 15 orang yang terdiri dari Anggota BPD sebanyak 2

orang dari 9 orang, aparat desa berjumlah 7 orang dari 20 orang, dan masyarakat berjumlah 8 orang dari 20 orang yang turut diundang.

Tabel. V.12: Rapat Pembuatan Pos Ronda Tanggal 04 Januari 2011

No.	Undangan	Hadir	Tidak hadir	Total
1.	Anggota BPD	4	5	9
2.	Aparat Desa	6	14	20
3.	Masyarakat	6	7	13
Jumlah		16	26	42

Sumber: Ketua BPD Desa Api-Api Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa peran aktif dari aparat desa, anggota BPD, dan masyarakat sangat kecil dalam mengikuti rapat-rapat desa. Ini terbukti dari 42 undangan yang hadir hanya 16 orang yang terdiri dari Anggota BPD sebanyak 4 orang dari 9 orang, aparat desa berjumlah 6 orang dari 20 orang, dan masyarakat berjumlah 6 orang dari 20 orang yang turut diundang.

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an dalam Surat Ali- Imran ayat 104 yang berbunyi:



Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung, (QS. Ali-Imran ayat 104).

Tabel. V.13: Tanggapan Responden Tentang Keikutsertaan Rapat Yang Dilakukan Oleh BPD dan Kepala Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	sangat baik	2	1,71%
	baik	5	4,27%
	cukup baik	2	1,71%
	kurang baik	-	0%
	tidak baik	-	0%
Aparat desa	sangat baik	-	0%
	baik	1	0,85%
	cukup baik	7	5,98%
	kurang baik	7	5,98%
	tidak baik	5	4,27%
Masyarakat	sangat baik	-	0%
	baik	26	22,22%
	cukup baik	15	12,82%
	kurang baik	36	30,77%
	tidak baik	11	9,40%
Jumlah		117	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari BPD responden yang ikut serta dalam rapat yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa yang menjawab dengan sangat baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), yang memilih jawaban baik berjumlah 5 orang atau (4,27%), selanjutnya yang memilih jawaban cukup baik berjumlah 2 orang

atau (1,71%), yang memilih jawaban kurang baik berjumlah tidak ada atau (0%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Selanjutnya responden yang berasal dari aparat desa yang jawaban sangat sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), memilih jawaban baik berjumlah 1 orang atau (0,85%), jawaban cukup baik berjumlah 7 orang atau (5,98%), dan memilih jawaban kurang baik berjumlah 7 orang atau (5,98%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah 5 orang atau (4,27%). Dan yang terakhir dari masyarakat dimana responden dari masyarakat memilih jawaban sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), memilih jawaban baik berjumlah 26 orang atau (22,22%), selanjutnya yang memilih jawaban cukup baik berjumlah 15 orang atau (12,82%), dan yang memilih jawaban kurang baik berjumlah 36 orang atau (30,77%), serta yang lebih memilih jawaban tidak baik berjumlah 11 orang atau (9,40%).

Keikutsertaan masyarakat dalam rapat yang diadakan oleh BPD dan Kepala Desa, masyarakat tidaklah berperan aktif secara baik, hal ini ditandai dengan banyaknya responden yang menjawab kurang baik yaitu berjumlah 36 orang atau (30,77%) dari 117 responden yang terdiri dari anggota BPD, aparat desa, dan masyarakat.

Masyarakat desa Api-Api tidaklah mengetahui secara menyeluruh tentang keikutsertaan merumuskan dan menetapkan peraturan desa, ini dikarenakan masyarakat tidak mengerti bahwasanya mereka mempunyai kewajiban dalam menyampaikan pendapat serta ide-ide mereka pada sebuah rapat. Selain kurangnya

koordinasi BPD serta aparat desa, masyarakat juga tidak didukung dengan sumber daya manusia yang baik, sehingga sulit dipahami dan dimengerti oleh sebagian masyarakat desa Api-Api. Lihatlah tabel berikut ini:

Tabel. V.14: Tanggapan Responden Tentang Keikutsertaan Merumuskan dan Menetapkan Peraturan Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	sangat baik	2	1,71%
	baik	1	0,85%
	cukup baik	6	5,13%
	kurang baik	-	0%
	tidak baik	-	0%
Aparat desa	sangat baik	-	0%
	baik	5	4,27%
	cukup baik	5	4,27%
	kurang baik	8	6,84%
	tidak baik	2	1,71%
Masyarakat	sangat baik	-	0%
	baik	9	7,69%
	cukup baik	17	14,52%
	kurang baik	53	45,29%
	tidak baik	9	7,69%
Jumlah		117	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari BPD responden yang ikut serta dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa yang memilih jawaban sangat baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), yang memilih jawaban baik berjumlah 1 orang atau (0,85%), selanjutnya memilih jawaban cukup baik berjumlah 6 orang atau

(5,13%), yang memilih jawaban kurang baik berjumlah tidak ada atau (0%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Selanjutnya responden yang berasal dari aparat desa yang memilih jawaban sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), jawaban baik berjumlah 5 orang atau (4,17%), memilih jawaban cukup baik berjumlah 5 orang atau (4,17%), dan memilih jawaban kurang baik berjumlah 8 orang atau (6,84%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah 2 orang atau (1,71%). Dan yang terakhir dari masyarakat dimana responden dari masyarakat memilih jawaban sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), menjawab baik berjumlah 9 orang atau (7,69%), selanjutnya yang menjawab cukup baik berjumlah 17 orang atau (14,52%), yang menjawab kurang baik berjumlah 53 orang atau (45,29%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah 9 orang atau (7,69%).

Berdasarkan tanggapan responden tersebut bahwa sebagian besar anggota BPD dan masyarakat tidak ikut serta dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa dan tentu saja hal ini berpengaruh terhadap pembangunan desa dan hal-hal lainnya yang terdapat di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

Peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan serta penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspeknya tidak akan dapat berjalan dengan optimal, bilamana wakil masyarakat yang berada di BPD sebagai orang terdepan dan memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya kepemimpinan seorang Kepala Desa, bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakat

dan pemerintahannya, tentu saja hal ini yang mengakibatkan kevakuman didalam roda pemerintahan desa itu sendiri. Padahal didalam UU No. 32 tahun 2004, PP No. 72 tahun 2005 serta Perda Kabupaten Bengkalis No. 06 tahun 2008 menjelaskan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah responden yang tidak pro-aktif baik didalam penetapan peraturan desa, perumusan peraturan desa, rapat-rapat yang diadakan oleh BPD dan Kepala Desa serta yang lainnya sehingga kinerja PBD tidak optimal.

5.B.3. Mengayomi

Mengayomi adat-istiadat adalah suatu yang tidak dipisahkan dengan masyarakat desa, karena keduanya saling menguntungkan. Dalam kehidupan masyarakat desa Api-Api, adat merupakan suatu nilai yang sampai pada saat ini dipertahankan dalam kehidupan kemasyarakatan. Terpeliharanya nilai-nilai adat dalam masyarakat akan membantu pemerintahan desa menyelenggarakan pemerintahan, karena adat mempunyai nilai lebih apabila dijalankan dengan baik akan menciptakan keteraturan dan ketertiban serta ketaatan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat itu sendiri.

Dari sisi kehidupan demokrasi, adat-istiadat telah dimanfaatkan oleh masyarakat desa, dimana Marbun dalam terjemahan Rauf dan Zulfan (2004: 33-34), mengatakan bahwa pada saat ini sistem kekeluargaan masih berurat akan seluruh

sudut Negara Republik Indonesia, bahkan mereka yang kemudian pindah dan bertempat tinggal di kota besar atau kecil tetap dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan memperaktekannya seperti dalam bentuk arisan, persatuan warga, persatuan kekeluargaan berdasarkan asal-usul dan lain sebagainya. Dari berbagai karya ilmiah tentang hukum adat dan sistem kehidupan warga desa, negara membuktikan bahwa dalam praktek kepemimpinan secara kekeluargaan tersebut berlaku dan diakui sebagai proses demokrasi. Hal ini terbukti pada kemampuan masyarakat untuk menentukan pemerintahan, untuk kemudian setia kepada pemerintahan secara turun temurun.

Disebutkan lagi bahwa, kekuasaan tertinggi dilingkungan masyarakat adat pada umumnya terletak pada rapat desa, yang dapat ditafsirkan sebagai dewan perwakilan rakyat dalam pengertian pada saat ini. Keanggotaan rapat adat ini terdapat kepala satuan adat (kepala suku/marga) bersama anggota masyarakat yang memenuhi syarat kemampuan (cukup umur, keturunan atau pemilik tanah para tetua) dan bersifat terbuka serta keputusan dalam rapat adat diambil menurut suatu sistem terbuka yang disebut musyawarah dan mufakat.

Karena adat sering dianggap salah satu bentuk asli dari budaya desa, maka fungsi pemerintahan desa hal ini memenuhi syarat untuk menentukan. Dikatakan menentukan, BPD merupakan representatif dari masyarakat desa yang ikut berpartisipasi dalam pemerintahan desa. Apabila BPD tidak memperhatikan masyarakat, maka pelayanan yang diberikan oleh Pemerintahan Desa baik Kepala Desa maupun BPD sebagai lembaga legislatif tidak akan berhasil dalam pencapaian

tujuan bersama dengan baik (optimal). Sehubungan dengan demikian untuk mengetahui sejauh mana BPD berperan sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat di Desa Api-Api dapat dilihat dari tanggapan-tanggapan berikut ini.

Tabel. V.15: Tanggapan Responden Tentang Kondisi Kelembagaan Adat

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	sangat baik	8	6,83%
	baik	1	0,85%
	cukup baik	-	0%
	kurang baik	-	0%
	tidak baik	-	0%
Aparat desa	sangat baik	4	3,42%
	baik	8	6,84%
	cukup baik	6	5,13%
	kurang baik	2	1,71%
	tidak baik	-	0%
Masyarakat	sangat baik	15	12,82%
	baik	29	24,78%
	cukup baik	21	17,94%
	kurang baik	10	8,55%
	tidak baik	13	11,11%
Jumlah		117	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari BPD responden yang mengomentari tentang kondisi kelembagaan adat memilih jawaban sangat baik berjumlah 8 orang atau (6,83%), yang memilih jawaban baik berjumlah 1 orang atau (0,85%), selanjutnya yang menjawab cukup baik berjumlah tidak ada atau (0%), yang menjawab kurang baik berjumlah tidak ada atau (0%), serta yang memilih jawaban

tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Selanjutnya responden yang berasal dari aparat desa yang memilih jawaban sangat baik berjumlah 4 orang atau (3,42%), jawaban baik berjumlah 8 orang atau (6,84%), jawaban cukup baik berjumlah 6 orang atau (5,13%), yang memilih jawaban kurang baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Dan yang terakhir responden dari masyarakat memilih jawaban sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), yang menjawab baik berjumlah 15 orang atau (12,82%), selanjutnya yang memilih jawaban baik berjumlah 29 orang atau (24,78%), yang memilih jawaban cukup baik berjumlah 21 orang atau (17,94%), yang memilih jawaban kurang baik berjumlah 10 orang (8,55%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah 1 orang atau (11,11%).

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi kelembagaan adat di Desa Api-Api sudah dapat digolongkan dalam kategori baik. Ini terbukti dengan banyaknya responden dari BPD memilih jawaban sangat baik dengan jumlah 8 orang atau (6,84%), dari aparat desa menjawab baik berjumlah 8 orang atau (6,84%), serta dari responden masyarakat menjawab baik berjumlah 29 orang atau (24,78%).

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat yaitu bapak Mohd. Nur Said dirumahnya, beliau mengatakan “Sesuai yang saya lihat selama ini kondisi kelembagaan adat di Desa Api-Api mulai membaik kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya”.

Selain menghadalkan dari hasil wawancara, penulis juga memaparkan hasil penelitian di lapangan dengan menyebarkan selebaran angket penelitian agar di isi

oleh masyarakat desa guna mengetahui apakah pakta ini benar-benar tidak hanya mengandalkan dari hasil wawancara saja. Berikut hasil quisioner penulis:

Tabel. V.16: Tanggapan Responden Tentang keikutsertaan Dalam Membina Lembaga Adat

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	sangat baik	2	1,71%
	baik	5	4,27%
	cukup baik	2	1,71%
	kurang baik	-	0%
	tidak baik	-	0%
Aparat desa	sangat baik	7	5,98%
	baik	5	4,27%
	cukup baik	3	2,56%
	kurang baik	1	0,85%
	tidak baik	4	3,41%
Masyarakat	sangat baik	21	17,95%
	baik	24	20,51%
	cukup baik	20	17,09%
	kurang baik	18	15,38%
	tidak baik	5	4,27%
Jumlah		117	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari BPD responden yang memilih jawaban sangat baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), yang memilih jawaban baik berjumlah 5 orang atau (4,27%), selanjutnya yang memilih jawaban cukup baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), dan yang menjawab kurang baik berjumlah 20 orang atau (17,09%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Selanjutnya responden yang berasal dari aparat desa yang memilih jawaban sangat

baik berjumlah 7 orang atau (5,98%), memilih jawaban baik berjumlah 5 orang atau (4,27%), memilih jawaban cukup baik berjumlah 3 orang atau (2,56%), dan jawaban kurang baik berjumlah 1 orang atau (0,85%), serta jawaban terakhir dari aparat desa memilih jawaban tidak baik berjumlah 4 orang atau (3,41%). Dan yang terakhir dari masyarakat dimana responden dari masyarakat menjawab sangat baik berjumlah 21 orang atau (17,95%), memilih jawaban baik berjumlah 24 orang atau (20,51%), selanjutnya yang memilih jawaban cukup baik berjumlah tidak ada atau (0%), dan yang menjawab kurang baik berjumlah 18 orang atau (15,38%), serta yang memilih untuk menjawab tidak baik berjumlah 5 orang atau (4,27%).

Dari hasil di atas jelaslah bahwa keikutsertaan dalam membina lembaga adat di desa Api-Api baik aparat desa, anggota BPD, maupun masyarakat sudah terlihat kepedulianya tentang kelestarian lembaga adat di desa tersebut, mereka menganggap bahwa sifat gotong royong dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya merupakan sebuah aturan yang benar-benar sejalan dengan hukum syara' agama islam dan patut untuk dipertahankan keberadaannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang ustad terkemuka di Desa Api-Api yaitu Ustad Drs. H. Abdulmanan mengatakan bahwa “ desa Api-Api ini masyarakatnya sangat menjunjung tinggi sistem gotong royong terkandung didalam nilai serta norma-norma adat disini. Adat disini tidak terlepas dari hukum-hukum islam, jadi terdapat sinkronisasi antara hukum adat dengan hukum syara' agama islam, contohnya dalam adat istiadat perkawinan misalnya”.

Tabel. V.17: Tanggapan Responden Tentang kepatuhan Terhadap Lembaga Adat

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	sangat baik	5	4,27%
	baik	2	1,71%
	cukup baik	1	0,85%
	kurang baik	1	0,85%
	tidak baik	-	0%
Aparat desa	sangat baik	8	6,84%
	baik	1	0,85%
	cukup baik	9	7,69%
	kurang baik	2	1,71%
	tidak baik	-	0%
Masyarakat	sangat baik	7	5,98%
	baik	15	12,82%
	cukup baik	36	30,77%
	kurang baik	24	20,51%
	tidak baik	6	5,13%
Jumlah		117	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari BPD responden yang lebih memilih jawaban sangat baik berjumlah 5 orang atau (4,27%), yang memilih jawaban baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), selanjutnya yang memilih jawaban cukup baik berjumlah 1 orang atau (0,85%), yang memilih jawaban kurang baik berjumlah 1 orang atau (0,85%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Selanjutnya responden yang berasal dari aparat desa yang memilih jawaban sangat baik berjumlah 8 orang atau (6,84%), dengan memilih jawaban yang baik berjumlah 1 orang atau (0,85%), memilih jawaban cukup baik berjumlah 9 orang atau

(7,69%), dan yang memilih jawaban kurang baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Dan yang terakhir dari masyarakat dimana responden dari masyarakat memilih jawaban sangat baik berjumlah 7 orang atau (5,98%), yang menjawab baik berjumlah 15 orang atau (12,82%), selanjutnya yang menjawab cukup baik berjumlah 36 orang atau (30,77%), yang memilih jawaban kurang baik berjumlah 24 orang atau (20,51%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah 6 orang atau (5,13%).

Masyarakat memandang dengan adanya keputusan-keputusan adat sangat membantu dalam memelihara keutuhan norma-norma serta nilai-nilai adat yang telah lama ada di Desa Api-Api tersebut. Masyarakat saling berkerjasama dalam memelihara lembaga adat yang ada secara utuh dan penuh rasa tanggungjawab.

Selama pengamatan yang penulis lakukan selama berada ditempat penelitian, penulis mengakui bahwa keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh para tokoh-tokoh adat, tokoh agama, beserta para perangkat desa beserta BPD memang sangat dipanuti masyarakat desa. Keputusan adat yang dibuat tidak untuk segelintir orang atau kelompok tertentu tetapi untuk seluruhnya yang bertempat tinggal di Desa tersebut. Walaupun nantinya terjadi pelanggaran norma-norma adat dan agama, maka pelaku mendapat sanksi yang tegas dari para pemuka-pemuka adat dan agama.

Berikut hasil penyebaran angket penelitian yang penulis lakukan di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis:

Tabel. V.18: Tanggapan Responden Terhadap Adanya Keputusan-Keputusan Lembaga Adat

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	sangat baik	6	5,13%
	baik	2	1,71%
	cukup baik	1	0,85%
	kurang baik	-	0%
	tidak baik	-	0%
Aparat desa	sangat baik	7	5,98%
	baik	8	6,84%
	cukup baik	3	2,56%
	kurang baik	1	0,85%
	tidak baik	1	0,85%
Masyarakat	sangat baik	12	10,26%
	baik	30	25,64%
	cukup baik	22	18,80%
	kurang baik	12	10,26%
	tidak baik	12	10,26%
Jumlah		117	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari BPD responden yang lebih memilih jawaban sangat baik berjumlah 6 orang atau (5,13%), yang memilih jawaban baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), selanjutnya yang memilih jawaban cukup baik berjumlah 1 orang atau (0,85%), dan yang memilih jawaban kurang baik berjumlah tidak ada atau (0%), serta terakhir yang memilih jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Selanjutnya responden yang berasal dari aparat desa yang lebih memilih jawaban sangat baik berjumlah 7 orang atau (5,98%), jawaban dengan baik berjumlah 8 orang atau (6,83%), memilih jawaban cukup baik berjumlah 3 orang atau

(2,56%), dan memilih jawaban kurang baik berjumlah 1 orang atau (0,85%), serta jawaban tidak baik berjumlah 1 orang atau (0,85%). Dan yang terakhir dari masyarakat dimana responden dari masyarakat lebih memilih jawaban sangat baik berjumlah 12 orang atau (10,26%), memilih jawaban baik berjumlah 30 orang atau (25,64%), selanjutnya yang memilih jawaban cukup baik berjumlah 22 orang atau (18,80%), dan yang menjawab kurang baik berjumlah 12 orang atau (10,26%), serta terakhir yang menjawab tidak baik berjumlah 12 orang atau (10,26%).

Tabel. V.19: Tanggapan Responden Tentang Pertanggungjawaban BPD Dalam Memelihara Nilai-Nilai Adat

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	sangat baik	3	2,56%
	baik	4	3,42%
	cukup baik	2	1,71%
	kurang baik	-	0%
	tidak baik	-	0%
Aparat desa	sangat baik	7	5,98%
	baik	5	4,27%
	cukup baik	3	2,56%
	kurang baik	1	0,85%
	tidak baik	4	3,42%
Masyarakat	sangat baik	18	15,38%
	baik	25	21,36%
	cukup baik	20	17,09%
	kurang baik	21	17,94%
	tidak baik	4	3,42%
Jumlah		117	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari BPD responden yang lebih memilih untuk menjawab sangat baik berjumlah 3 orang atau (2,56%), yang memilih jawaban baik berjumlah 4 orang atau (3,42%), selanjutnya yang memilih jawaban cukup baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), dan yang menjawab kurang baik berjumlah tidak ada atau (0%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Selanjutnya responden yang berasal dari aparat desa yang memilih jawaban sangat baik berjumlah 7 orang atau (5,97%), memilih jawaban baik berjumlah 5 orang atau (4,27%), memilih jawaban cukup baik berjumlah 3 orang atau (2,56%), memilih jawaban kurang baik berjumlah 1 orang atau (0,85%), serta memilih jawaban tidak baik berjumlah 4 orang atau (3,42%). Dan yang terakhir dari masyarakat dimana responden dari masyarakat memilih jawaban sangat baik berjumlah 18 orang atau (15,38%), menjawab baik berjumlah 25 orang atau (21,36%), selanjutnya yang menjawab cukup baik berjumlah 20 orang atau (17,09%), dan yang menjawab kurang baik berjumlah 21 orang atau (17,94%), serta yang menjawab tidak baik berjumlah 4 orang atau (3,42%).

Dari hasil pernyataan di atas mengenai tanggapan tentang lembaga adat di Desa Api-Api menunjukkan bahwa keberadaan lembaga tersebut telah diakui, tetapi didalam pelaksanaan, keikutsertaan dalam pembinaan, kepatuhan terhadap keputusan-keputusan, serta pertanggungjawaban memelihara nilai-nilai adat tersebut sangatlah sedikit, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian di atas.

5.B.4. Menyampaikan Aspirasi

Menampung dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat dan instansi yang berwenang. Dalam fungsi BPD harus mengetahui dan mampu menampung apa saja yang disampaikan oleh masyarakat baik itu berupa ide atau gagasan didalam pelaksanaan pembangunan ataupun yang lainnya.

Kepentingan rakyat, kebutuhan rakyat, keinginan rakyat, nilai-nilai dan harapan mereka bisa dipenuhi tetapi juga bisa mengecewakan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, warga negara sangat memperhatikan dan berkepentingan dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka menyatakan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka betuk bersama dengan kepentingan yang sama.

Kontribusi atau gambaran di atas tentang keinginan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Desa Api-Api adalah memberikan aspirasinya kepada BPD maupun pemerintah desa agar keinginan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa berjalan secara optimal sesuai unsur pemerintahan desa.

Konsekuensi pelaksanaan yang mengidentifikasi fungsi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang ditengah masyarakat dapat diterima dengan baik tanpa ada pengecualian. Setelah anggota BPD mengetahui kondisi objektif yang sedang dialami oleh masyarakat secara kongrit dapat diselesaikan dengan musyawarah. Jadi anggota BPD di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan tugasnya yaitu

menyalurkan aspirasi masyarakat atau fungsi lainnya sebagai layaknya lembaga perwakilan masyarakat desa, hanya saja dalam realisasi belum berjalan dengan optimal dan konsekuensinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat sesuai dengan permasalahan yang timbul dimasyarakat di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menemui permasalahan tentang penyampaian aspirasi serta menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Api-Api dimana ironisnya masyarakat di Desa Api-Api sekarang seperti hilang arah tujuan hal ini dikarenakan semua apa yang telah mereka lakukan semuanya tidak ditanggapi secara serius oleh anggota BPD tentang beredarnya serta meraknya penyakit masyarakat. Studi kasusnya penulis menemukan banyaknya para pemuda di Desa Api-Api bermain judi di daerah pemukiman warga yang ditanggal sejak lama seolah-olah rumah kosong itu menjadi markas basar bagi merteka dalam berjudi. Yang lebih menyedihkan bahwa ada sebagian diantara mereka merupakan aparat desa dan anggota BPD itu sendiri.

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. V.20: Tanggapan Responden Tentang BPD Yang Telah Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	sangat baik	5	4,27%
	baik	-	0%
	cukup baik	2	1,71%
	kurang baik	2	1,71%
	tidak baik	-	0%
Aparat desa	sangat baik	-	0%
	baik	-	0%
	cukup baik	4	3,42%
	kurang baik	9	7,69%
	tidak baik	7	5,98%
Masyarakat	sangat baik	-	0%
	baik	14	11,96%
	cukup baik	17	14,52%
	kurang baik	34	29,05%
	tidak baik	23	19,65%
Jumlah		117	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari BPD responden yang memilih jawaban sangat baik berjumlah 5 orang atau (4,27%), yang memilih jawaban baik berjumlah tidak ada atau (0%), selanjutnya yang memilih jawaban cukup baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), yang menjawab kurang baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Selanjutnya responden yang berasal dari aparat desa yang memilih jawaban sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), jawaban baik berjumlah tidak ada atau (0%), yang memilih jawaban cukup baik berjumlah 4 orang atau (3,42%), yang memilih

jawaban kurang baik berjumlah 9 orang atau (7,69%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah 7 orang atau (5,98%). Dan yang terakhir dari masyarakat dimana responden masyarakat memilih jawaban sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), memilih jawaban baik berjumlah 14 orang atau (11,96%), selanjutnya yang menjawab cukup baik berjumlah 17 orang atau (14,52%), yang memilih jawaban kurang baik berjumlah 34 orang atau (29,05%), serta yang menjawab tidak baik berjumlah 23 orang atau (19,65%).

Dari tabel dan keterangan di atas jelaslah bahwa keberadaan BPD belum bisa menjadikan lembaga perwakilan masyarakat desa sebagai wadah atau tempat bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah seorang guru SLTP yang merupakan warga atau penduduk setempat di Desa Api-Api yaitu bapak Zanirwan, beliau mengatakan:

“BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan dari masyarakat desa tidak begitu serius dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, contohnya apabila ada aduan-aduan dari masyarakat apapun jenis permasalahan itu BPD tidak pernah tanggap dan berusaha mencari solusi apa yang harus diberi dan tindakan apa sepatutnya yang perlu dilakukan,sepertinya anggota BPD tidak percaya diri dalam mengemban tanggungjawab mereka sebagai lembaga penampung dan penyalur aspirasi masyarakat”.

Selain pemaparan tentang pandangan penulis dan hasil dari wawancara, penulis juga membuktikan dengan hasil penyebaran angket penelitian. Hasil dari penyebaran angket penelitian dipaparkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel. V.21: Tanggapan Responden Tentang Aspirasi Yang Telah Disalurkan Ke Instansi Berwenang

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	sangat baik	3	2,56%
	baik	-	0%
	cukup baik	6	5,12%
	kurang baik	-	0%
	tidak baik	-	0%
Aparat desa	sangat baik	1	0,85%
	baik	1	0,85%
	cukup baik	5	4,27%
	kurang baik	5	4,27%
	tidak baik	8	6,83%
Masyarakat	sangat baik	-	0%
	baik	17	14,52%
	cukup baik	20	17,09%
	kurang baik	36	30,76%
	tidak baik	15	12,82%
Jumlah		117	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari BPD responden yang memilih jawaban sangat baik berjumlah 3 orang atau (2,56%), yang memilih baik berjumlah tidak ada atau (0%), selanjutnya memilih cukup baik berjumlah 6 orang atau (5,12%), dan yang menjawab kurang baik berjumlah tidak ada atau (0%), serta jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Selanjutnya responden yang berasal dari aparat desa yang memilih jawaban sangat baik berjumlah 1 orang atau (0,85%), yang memilih baik berjumlah 1 orang atau (0,85%), jawaban cukup baik berjumlah 5 orang atau (4,27%), dan yang memilih jawaban kurang baik berjumlah 5 orang atau

(4,27%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah 8 orang atau (6,83%). Dan yang terakhir dari masyarakat dimana responden dari masyarakat memilih jawaban sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), menjawab baik berjumlah 17 orang atau (14,52%), selanjutnya yang menjawab cukup baik berjumlah 20 orang atau (17,09%), yang menjawab kurang baik berjumlah 36 orang atau (30,76%), serta yang terakhir menjawab tidak baik berjumlah 15 orang atau (12,82%).

Tabel. V.22: Tanggapan Responden Tentang Aspirasi Yang Diberikan Oleh Masyarakat Pada BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	sangat baik	4	3,42%
	baik	5	4,27%
	cukup baik	-	0%
	kurang baik	-	0%
	tidak baik	-	0%
Aparat desa	sangat baik	2	1,71%
	baik	1	0,85%
	cukup baik	4	3,42%
	kurang baik	5	4,27%
	tidak baik	8	6,83%
Masyarakat	sangat baik	-	0%
	baik	14	11,96%
	cukup baik	23	19,65%
	kurang baik	34	29,05%
	tidak baik	17	14,52%
Jumlah		117	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari BPD responden yang cuma memilih jawaban sangat baik berjumlah 4 orang atau (3,42%), yang memilih jawaban baik berjumlah 5 orang atau (4,27%), selanjutnya memilih jawaban cukup baik berjumlah tidak ada atau (0%), dan yang menjawab kurang baik berjumlah tidak ada atau (0%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Selanjutnya responden yang berasal dari aparat desa yang memilih jawaban sangat baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), memilih jawaban baik berjumlah 1 orang atau (0,85%), yang memilih jawaban cukup baik berjumlah 4 orang atau (3,42%), dan memilih jawaban kurang baik berjumlah 5 orang atau (4,27%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah 8 orang atau (6,83%). Dan yang terakhir dimana responden berasal dari masyarakat memilih jawaban sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), memilih jawaban baik berjumlah 14 orang atau (11,96%), selanjutnya yang menjawab cukup baik berjumlah 23 orang atau (19,65%), yang menjawab kurang baik berjumlah 34 orang atau (29,05%), serta yang menjawab tidak baik berjumlah 17 orang atau (14,52%).

Kurangnya aspirasi masyarakat membuat BPD sebagai lembaga legislatif mini yang berada di tengah-tengah masyarakat bertanggungjawab terhadap permasalahan yang timbul dimasyarakat ini mengalami kevakuman.

Berikut hasil penyebaran angket penelitian yang penulis lakukan di Desa Api-Api tentang usaha BPD dalam menyerap serta menampung aspirasi dari masyarakat, dan apakah BPD sudah menjalankan fungsinya dengan sangat baik atau tidak.

Tabel. V.23: Tanggapan Responden Tentang BPD Yang Menyerap Aspirasi Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	sangat baik	6	5,12%
	baik	3	2,56%
	cukup baik	-	0%
	kurang baik	-	0%
	tidak baik	-	0%
Aparat desa	sangat baik	2	1,71%
	baik	3	2,56%
	cukup baik	4	3,42%
	kurang baik	9	7,69%
	tidak baik	2	1,71%
Masyarakat	sangat baik	-	0%
	baik	18	15,38%
	cukup baik	31	26,49%
	kurang baik	20	17,09%
	tidak baik	19	16,23%
Jumlah		117	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari BPD responden yang memilih jawaban sangat baik berjumlah 6 orang atau (5,12%), yang memilih jawaban baik berjumlah 3 orang atau (2,56%), selanjutnya menjawab cukup baik berjumlah tidak ada atau (0%), yang memilih jawaban kurang baik berjumlah tidak ada atau (0%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Selanjutnya responden yang berasal dari aparat desa yang memilih untuk menjawab dari jawaban sangat baik berjumlah 2 orang atau (1,71%), yang memilih baik berjumlah 3 orang atau (2,56%), yang memilih jawaban cukup baik berjumlah 4 orang atau (3,42%), dan

yang memilih jawaban kurang baik berjumlah 9 orang atau (7,69%), serta memilih jawaban tidak baik berjumlah 2 orang atau (1,71%). Dan yang terakhir dari masyarakat dimana responden dari masyarakat yang memilih jawaban sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), menjawab baik berjumlah 18 orang atau (15,38%), selanjutnya yang menjawab cukup baik berjumlah 31 orang atau (26,49%), yang memilih jawaban kurang baik berjumlah 20 orang atau (17,09%), serta terakhir yang memilih jawaban tidak baik berjumlah 19 orang atau (16,23%).

Keberadaan masyarakat yang tidak proaktif terhadap keberadaan BPD membuat aspirasi masyarakat tidak dapat diserap oleh BPD, serta keterbatasan sumber daya manusia pada setiap anggota BPD tentang pelaksanaan tugas dan fungsi BPD itu sendiri, sehingga banyak aspirasi masyarakat tidak dapat dipahami serta ditanggapi dengan baik sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut dalam aspirasinya.

Tentu saja kita mencari titik terang atau jalan keluar dari permasalahan ini yaitu dengan cara sedikit-tidaknnya setiap anggota BPD pada khususnya harus mendapat pelatihan-pelatihan serta diberi pendidikan sekurang-kurangnya pendidikan dan pelatihan masalah tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif mini yang terdapat di Desa. Adapun tujuannya yaitu apabila aspirasi masyarakat mulai ada mereka tanggap dan cepat merespon serta memberikan titik terang sekurang-kurangnya memberikan pengarahannya bagaimana cara yang baik dalam menanggapi masalah yang timbul.

Tabel. V.23: Tanggapan Responden Tentang Tata Cara Menyampaikan Aspirasi

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	sangat baik	1	0,85%
	baik	8	6,83%
	cukup baik	-	0%
	kurang baik	-	0%
	tidak baik	-	0%
Aparat desa	sangat baik	-	0%
	baik	4	3,42%
	cukup baik	1	0,85%
	kurang baik	10	8,54%
	tidak baik	5	4,27%
Masyarakat	sangat baik	-	0%
	baik	18	15,38%
	cukup baik	21	17,94%
	kurang baik	29	24,78%
	tidak baik	20	17,09%
Jumlah		117	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari BPD responden yang memilih jawaban sangat baik berjumlah 1 orang atau (0,85%), yang memilih jawaban baik berjumlah 8 orang atau (6,83%), selanjutnya menjawab cukup baik berjumlah tidak ada atau (0%), dan yang menjawab kurang baik berjumlah tidak ada atau (0%), serta yang memilih jawaban tidak baik berjumlah tidak ada atau (0%). Selanjutnya responden yang berasal dari aparat desa yang lebih memilih untuk menjawab sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), memilih jawaban baik berjumlah 4 orang atau (3,42%), memilih jawaban cukup baik berjumlah 1 orang atau (0,85%), dan yang

memilih jawaban kurang baik berjumlah 10 orang atau (8,54%), serta yang terakhir memilih jawaban tidak baik berjumlah 5 orang atau (4,27%). Dan yang terakhir dari masyarakat dimana responden dari masyarakat memilih untuk menjawab sangat baik berjumlah tidak ada atau (0%), memilih jawaban baik berjumlah 18 orang atau (15,38%), selanjutnya yang memilih jawaban cukup baik berjumlah 21 orang atau (17,94%), dan yang memilih jawaban kurang baik berjumlah 29 orang atau (24,78%), serta yang memilih untuk menjawab tidak baik berjumlah 20 orang atau (17,09%).

Hal ini dapat dimaklumi, jika masyarakat belum mengetahui bagaimana tata cara dan tempat dimana harus menyalurkan aspirasinya, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak BPD kepada masyarakat tentang fungsinya.

Tabel. V.24: Rekapitulasi Dari Hasil Angket Tentang Fungsi BPD di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Indikator Pertanyaan	Sangat Baik		Baik		Cukup Baik		Kurang Baik		Tidak Baik	
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Pengawasan	16	8,69	64	15,35	89	18,24	184	26,25	125	32,98
Legislasi	14	7,60	83	19,90	111	22,74	182	25,96	73	19,26
Mengayomi	130	70,7	164	39,33	150	30,74	142	20,25	57	15,03
Menyampaikan Aspirasi	24	13,0	106	25,42	138	28,28	193	27,53	124	32,72
Jumlah	184	100%	417	100%	488	100%	701	100%	379	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari rekapitulasi hasil angket penelitian tentang pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis di atas dapat diketahui bahwa:

1. Pengawasan, pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pengawasan tidak berjalan dengan sangat baik atau optimal terlihat dengan jumlah jawaban responden memilih jawaban cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, dengan alasan BPD kurang berfungsi dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan desa, seperti mengawasi jalannya anggaran pendapatan asli desa (PAD), kekayaan desa dan mengawasi pembangunan desa serta mengawasi jalannya anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa).
2. Legislasi, pada tabel di atas dapat diketahui legislasi tidak berjalan dengan optimal yang terlihat dengan jumlah jawaban responden terbanyak lebih memilih jawaban kurang baik/cukup baik serta tidak baik, karena semenjak BPD berdiri hingga sekarang belum pernah membuat peraturan desa itu dengan baik, kecuali peraturan desa yang berkaitan dengan penggunaan anggaran desa.
3. Mengayomi, pada tabel di atas dapat diketahui bahwa mengayomi adat istiadat hampir berjalan dengan baik tetapi tetap dikatakan belum berjalan secara optimal, ini terlihat banyaknya jumlah responden memilih jawaban cukup baik, kurang baik dan tidak baik apa bila dibandingkan dengan jawaban sangat baik dan baik.
4. Menampung dan menyalurkan aspirasi, pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam menyalurkan aspirasi tidak berjalan dengan baik atau belum

optimal yang terlihat dengan banyaknya responden cenderung memilih jawaban cukup baik, kurang baik dan tidak baik apa bila dibandingkan dengan jawaban sangat baik dan baik. Hal ini dikarenakan setiap aspirasi yang datang dari masyarakat BPD kurang menanggapi aspirasi itu dengan baik.

Jadi akumulasi dari seluruh indikator penelitian terdapat satu fungsi BPD yang berjalan dengan baik yaitu mengayomi adat-istiadat, sedangkan yang ketiga lainnya yang meliputi pengawasan, legislasi, mengayomi, dan menampung serta menyalurkan aspirasi di Desa Api-Api tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Dengan adanya beberapa pelaksanaan fungsi BPD yang masih kurang pelaksanaannya, yaitu pengawasan, legislasi, dan menyampaikan aspirasi masyarakat maka pelaksanaan fungsi BPD belum berjalan secara baik atau tidak optimal.

5.C. Faktor Penyebab Mengapa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Belum Dapat Menyelenggarakan Fungsinya Dengan Baik

Adapun fungsi BPD di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis masih belum dapat menyelenggarakan fungsinya dengan optimal sesuai apa yang diharapkan oleh kita bersama, maka penulis akan menguraikan analisa dari temuan di lapangan tempat penulis melakukan penelitian mengenai faktor-faktor mengapa BPD di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis belum dapat menyelenggarakan fungsinya dengan baik.

1. Faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam BPD itu sendiri:
 - a. Keberadaan BPD Desa Api-Api yang tergolong masih baru, dimana baru terbentuk pada tahun 2002 sehingga dapat dipahami struktur dan sistem kerjanya belum optimal dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di masyarakat, serta dapat kita ketahui bahwa BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak percaya diri.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana, tidak ada satupun organisasi yang berkembang tanpa adanya sumber dana yang jelas. Merupakan suatu kenyataan bahwa dari semua bentuk organisasi baik dari organisasi pemerintah maupun bukan, harus dihadapkan pada keterbatasan sumber dana. Berdasarkan wawancara dengan kepala BPD di Desa Api-Api yaitu Bapak Suryanto dirumahnya bahwa BPD memiliki keterbatasan ruang gerak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dana yang diperoleh dari Pemda Kabupaten Bengkalis yang setiap tahunnya tidak mencukupi. Selain itu, tidak terdapatnya kantor BPD sendiri dan selama ini hanya menumpang di kantor Kepala Desa. Itulah salah satu faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Keterbatasan dan minimnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Demikian juga dengan BPD di Desa Api-Api yang tidak memiliki kantor sendiri, sehingga setiap menyelenggarakan rapat-rapat yang BPD buat dilakukan di Kantor Kepala Desa.

Tabel. V.25: Sarana Dan Prasarana BPD di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

No	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
1.	Kantor	Tidak ada
2.	Kursi dan meja kantor	Ada
3.	Arsip dan dokumen lainnya	Ada
4.	Kendaraan oprasional	Tidak ada
5.	Komputer dan mesin tiks	Ada

Sumber: Data Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas jelaslah bahwa BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD di Desa Api-Api selama ini tidak memiliki kantor sendiri, sehingga setiap menyelenggarakan rapat-rapat yang BPD buat dilakukan di kantor Kepala Desa. Kepala Desa telah membuat kebijakan, bahwa BPD diberikan satu ruangan yang ukurannya lebih kurang 3x4 m² di Kantor Kepala Desa sebagai sekretariat BPD.

Solusi terbaik adalah bagaimana BPD bisa berperan aktif serta bekerja secara optimal walaupun kantor tidak ada tentunya dengan memperhatikan apa kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi oleh sebuah lembaga yang mempunyai tanggungjawab terhdap masyarakatnya dan ini tentu didukung dengan rasa kepedulian serta mengharapkan pekerjaan yang semata-mata karena Allah SWT.

Tabel. V.26: Daftar Impralis Barang BPD di Kantor Kepala Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

No	Jenis-Jenis Barang	Keterangan
1.	Kursi dan meja kantor	Ada
2.	Komputer dan mesin tiks	Ada
3.	Arsip dan dokumen lainnya	Ada
4.	Printer	Ada
5.	Pena, spidol, buku, kertas dan sebagainya	Ada

Sumber: Data Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

- c. Kurangnya Koordinasi, koordinasi merupakan penyesuaian diri dari satu sama lain dalam pekerjaan yang harus dilakukan dengan tepat agar masing-masing dapat saling memberikan kontribusi yang membangun untuk masa depan yang lebih cemerlang. Koordinasi sangat penting dilakukan oleh setiap anggota BPD, namun kenyataan dilapangan anggota BPD selalu mempertahankan ide dan gagasan mereka berdasarkan kepentingan masing-masing. Anggota BPD disibukkan oleh aktivitasnya masing-masing sehingga tidak mengerti apa yang sebenarnya permasalahan sedang dihadapi dan untuk siapa mereka dipilih kalau bukan untuk masyarakat yang

membutuhkan bimbingan serta tempat mengadu dalam menyalurkan aspirasi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua BPD yaitu bapak Azmi, beliau mengatakan “Anggota BPD kepadatan jadwal pekerjaan serta sibuk dengan urusan mereka pribadi, sehingga kurangnya koordinasi diantara anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya”.

Tidak adanya koordinasi yang baik membuat komunikasi serta kinerja memburuk atau terjadinya kevakuman dalam berinteraksi. Yang paling penting perlu diketahui oleh setiap anggota BPD adalah komitmen dari anggota BPD itu sendiri sebagai perwakilan dari masyarakat desa yang harus diterapkan dalam diri sendiri pada setiap masing-masing anggota dengan mendahului kepentingan bersama dari pada kepentingan sendiri atau pribadi. Oleh karena itu, hendaknya jalinkan kerja sama yang baik dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yaitu antara BPD dengan pemerintah desa.

Namun BPD telah menunjukan kondisi yang serba kekurangan baik berupa infrastruktur maupun pemberdayaan kualitas sumber daya manusia serta kondisi pada Pemerintahan Desa itu sendiri.

2. Faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar lingkungan BPD itu sendiri:
 - a. BPD di Desa Api-Api sering mengalami permasalahan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan juga permasalahan-permasalahan lainnya dalam menjalankan fungsi BPD di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten

Bengkalis. Sebagian masyarakat berasumsi karena sudah menjadi tugas dan fungsi BPD sebagai wakil masyarakat untuk mendekati mereka dan mencermati setiap aspirasi yang berkembang dan ditimbulkan oleh masyarakat di Desa Api-Api apalagi sampai tuntutan aspirasi melalui rapat atau sebutan lain yaitu musyawarah.

- b. Kurangnya partisipasi masyarakat desa Api-Api, hal ini terlihat dengan tidak antusiasnya masyarakat untuk menghadiri dan aktif dalam rapat-rapat untuk menyampaikan ide-ide serta gagasan dalam rapat desa. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya rapat-rapat atau musyawarah dalam rangka menampung aspirasi masyarakat desa Api-Api.
- c. Kurangnya tingkat keberhasilan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikarenakan masyarakat desa Api-Api tidak atau kurangnya pengetahuan tentang hal-hal apa saja sebenarnya yang layak untuk disalurkan kepada pemerintah desa serta kepada siapa seharusnya aspirasi itu disampaikan atau disalurkan.

Dari pernyataan di atas tentu saja ada usaha untuk keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut agar pelaksanaan fungsi BPD menjadi semakin baik. Adapun usaha untuk keluar dari permasalahan yang bersal dari faktor intern dan faktor ekstern adalah:

1. Faktor intern, yaitu:
 - a. Diharapkan kepada seluruh anggota BPD dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga legislatif mini yang berada ditengah-tengah masyarakat mampu melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004, PP No. 72 tahun 2005, dan Perda Kabupaten Bengkalis No.06 tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa, serta percaya diri dalam bekerja.
 - b. Meyediakan serta meningkatkan sarana dan prasaran dengan cara memanfaatkan dana ADD yang telah pemerintah berikan kepada desa.
 - c. Tingkatkan koordinasi antara BPD dengan perangkat desa agar terjalin hubungan kerja yang baik sehingga terciptanya kinerja yang efektif dan efisien.
2. Faktor ekstern, yaitu:
 - a. Tetap memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat dengan mengeratkan hubungan silaturahmi, berilah kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan terimalah serta ambilah keputusan dengan bijaksana.
 - b. Mengajak masyarakat untuk dapat menghadiri setiap rapat-rapat yang diselenggarakan oleh BPD sehingga masyarakat bisa memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan ide-ide serta gagasan yang ada.

BAB VI

PENUTUP

6.A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Fungsi BPD meliputi tugas dan tanggungjawab dalam pengawasan, merumuskan dan menetapkan peraturan desa (legislasi), mengayomi adat-istiadat, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- a. Pengawasan

Fungsi BPD di Desa Api-Api terhadap pengawasan kurang atau tidak berjalan dengan optimal, hal ini terlihat dari jumlah jawaban responden terbanyak yaitu memilih jawaban tidak baik sebagai mana terdapat pada tabel V.4 sebesar 44,44%, dan jawaban tidak baik terdapat pada tabel V.5 sebesar 48% yang menjawab demikian, dengan alasan BPD kurang menjalankan fungsinya sebagai badan legislatif yang bertugas mengawasi terhadap peraturan-peraturan desa yang dibuat oleh Kepala Desa.

- b. Legislasi

Fungsi BPD di Desa Api-Api terhadap legislasi kurang atau tidak berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari jumlah jawaban responden

terbanyak yaitu memilih jawaban kurang baik terbukti pada tabel V.11 sebesar 45,29% dan menjawab tidak baik berjumlah 26,49% ini terbukti pada tabel V.9 yang menyatakan demikian, karena semenjak BPD berdiri hingga sampai pada saat ini belum pernah membuat peraturan desa, kecuali peraturan desa yang berkaitan dengan penggunaan anggaran desa.

c. Mengayomi adat-istiadat

Fungsi BPD di Desa Api-Api didalam mengayomi adat-istiadat sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari jumlah jawaban responden terbanyak yaitu memilih jawaban baik dengan jumlah 25,64% terbukti pada tabel V.15 dan cukup baik berjumlah 24,78% ini terbukti pada tabel V.12 yang menyatakan demikian, dengan alasan bahwa BPD dan masyarakat telah ikut berperan aktif serta membina adat-istiadat di Desa Api-Api, misalnya melestarikan adat melayu pinggirannya khususnya bagi masyarakat di Desa Api-Api yang wilayahnya tidak begitu jauh dari Ibu Kota Kabupaten Bengkalis dan membina lembaga-lembaga adat serta mendukung keputusan lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.

d. Menampung aspirasi

Fungsi BPD di Desa Api-Api terhadap tanggungjawabnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat belum optimal sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari jumlah jawaban responden terbanyak yaitu cenderung memilih jawaban kurang baik sebesar 29,05% ini terbukti pada tabel V.17 dan menjawab tidak baik sebesar 30,76% ini

terbukti pada tabel V.18 yang menyatakan demikian, karena setiap masyarakat menyalurkan aspirasinya kepada anggota BPD kurang direspon dan ditanggapi dengan baik.

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa terdapat salah satu fungsi BPD yang berjalan dengan baik yaitu fungsi BPD tentang mengayomi adat-istiadat dengan pembuktian banyaknya responden yang memilih jawaban sangat baik yaitu 164 atau (39,33%). Sedangkan untuk fungsi BPD yang lainnya belum berjalan dengan baik atau tidak optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya responden memilih jawaban kurang baik yaitu untuk fungsi pengawasan berjumlah 184 atau (26,25%), untuk legislasi berjumlah 182 atau (25,96%), dan untuk fungsi penyampaian aspirasi responden memilih jawaban kurang baik berjumlah 193 atau (27,53%) ini terbukti dengan rekapitulasi dari hasil angket tentang fungsi BPD di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis pada tabel V.24.

2. Yang menjadi faktor penyebab mengapa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis belum dapat menyelenggarakan fungsinya dengan baik diakibatkan dua faktor yaitu:
 - a. Faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam BPD itu sendiri yang meliputi tentang keberadaan BPD yang relatif masih baru, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi diantara anggota BPD dengan pemerintah desa, serta kurang percaya diri dalam menjalankan

fungsi dan tugas BPD yang telah diamanatkan dalam Perda No. 06 tahun 2005.

- b. Faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar lingkungan BPD itu sendiri yaitu BPD di Desa Api-Api sangat sering mengalami permasalahan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang kemana tempat seharusnya menyalurkan aspirasi tersebut dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat desa dalam rangka menampung aspirasi masyarakat.

Kesimpulanya bahwa, BPD belum bisa menjalankan serta menerapkan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif mini yang sudah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, PP No. 72 tahun 2005, serta Perda Kabupaten Bengkalis No. 06 tahun 2008 tentang tugas dan fungsi BPD dengan baik.

6.B. Saran

Adapun saran penulis kepada BPD di Desa Api-Api adalah:

1. Diharapkan BPD di Desa Api-Api mampu menjalankan fungsi dan tugas serta tanggungjawabnya secara optimal. Maka dituntut kepada seluruh anggota BPD untuk melakukan berbagai pelatihan-pelatihan serta pembinaan pendidikan formal secara insentif agar dapat dan mampu melakukan tanggungjawabnya didalam fungsi dan tugas BPD secara baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

2. Agar pelaksanaan fungsi berjalan dengan baik, maka harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, dukungan dana yang mencukupi serta jelas keberadaannya. Maka diharapkan pemerintah desa dapat saling berkerjasama dan saling membantu penyediaan sarana dan prasarana penunjang bagi BPD. Tentu saja hal ini dilakukan dengan mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah terkait dalam mencukupi kebutuhan yang diperlukan BPD atau manfaatkanlah ADD yang ada dengan sebaik mungkin.
3. Agar masyarakat mengerti dan memahami kemana seharusnya tempat mereka menyalurkan aspirasi, hendaknya BPD dan dibantu oleh pemerintah desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tempat penyaluran aspirasi masyarakat desa dalam pemerintahan desa ditujukan kepada BPD selaku badan legislatif mini yang ada di Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Nopri, 2008. *Buku Ajar: Pengantar Manajemen*, Tanpa Penerbit. Pekanbaru.
- Flippo, B. Edwin. 1984. *Manajemen Personalia (Terjemahan Moh. Masud)*. Penerbit Erlangga.
- Gie, The Liang, 2009. *Administrasi Perkantoran Modern*. Cet, ke- 9. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- , 1982. *Dari administrasi ke filsafat: suatu kumpulan karangan*. Cet. Ke- 3. Penerbit Karya Kencana, Yogyakarta.
- H.A.W. Widjaja, 1998, *Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1993, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, Penerbit Grafindo Persada, Jakarta.
- Marnis, 2008, *Pengantar Manajemen*. Penerbit Unri Press, Pekanbaru.
- Rivai Veitzal, 2004, *Kepemimpinan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Salindeho, John, 1989, *Peranan Tindak Lanjut Dalam Manajemen*. Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Purwo, 2003, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Siagian, S.P, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- , 2002, *Sistem Informasi Manajemen*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Syaukani, dkk. 2005, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Thoha Miftah, 1990, *Kepemimpinan dan manajemensuatu pendekatan perilaku*, Sinar Baru, Bandung.

Sumber Lain:

Al-Quran dan Terjemahannya, Penerbit CV Darus Sunnah, Jatinegara-Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Penerbit Arkola, Surabaya.

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 04 tahun 2008 tentang *Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa*. Penerbit Challenger, Bengkalis.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 06 tahun 2008 tentang *Badan Permusyawaratan Desa*. Penerbit Challenger, Bengkalis.

DAFTAR GAMBAR

Bagan I: Bagan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

Api-API Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Periode 2008-201248

DAFTAR TABEL

BAB I

Tabel. I.1	Daftar Jumlah Aparat Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis	7
Tabel. I.2	Absensi Rapat Tanggal 12 Januari 2011	8
Tabel. I.3	Daftar Tingkat Kehadiran Aparat Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2010	9

BAB III

Tabel.III.1	Rekapitulasi Populasi dan Sampel Penelitian Di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis	31
-------------	---	----

BAB IV

Tabel. IV.1	Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Api-Api	34
Tabel. VI.2	Klasifikasi Penduduk Menurut Kelompok Umur Desa Api-Api	35
Tabel. IV.3	Sarana Pendidikan Desa Api-Api	39
Tabel. IV.4	Pendidikan Masyarakat Desa Api-Api	39
Tabel. IV.5	Jumlah Sarana Ibadah Desa Api-Api	41

BAB V

Tabel. V.1	Tingkat Pendidikan Responden BPD.....	50
Tabel. V.2	Tingkat Pendidikan Responden Aparat Desa	51

Tabel. V.3	Tingkat Pendidikan Responden Masyarakat	52
Tabel. V.4	Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Terhadap Peraturan Desa	56
Tabel. V.5	Tanggapan Responden Tentang Adanya Keputusan Desa.....	59
Tabel. V.6	Tanggapan Responden Tentang Pengawasan BPD Tentang Keputusan Desa Yang di Buat Oleh Kepala Desa	61
Tabel.V.7	Tanggapan Responden Terhadap Berjalannya Fungsi Pengawasan BPD	63
Tabel. V.8	Tanggapan Responden Tentang Peraturan Desa Yang Dibuat BPD Dan Kepala Desa	66
Tabel. V.9	Tanggapan Responden Tentang Cara Pembuatan Peraturan Desa	68
Tabel.V.10	Absensi Rapat Koordinasi Tanggal 10 Maret 2010	72
Tabel. V.11	Rapat Persiapan Menghadapi HUT RI Tanggal 12 Agustus 2010 ...	72
Tabel. V.12	Rapat Pembuatan Pos Ronda Pada Tanggal 04 Januari 2011	73
Tabel. V.13	Tanggapan Responden Tentang Keikutsertaan Rapat Yang Dilakukan Oleh BPD dan Kepala Desa.....	74
Tabel.V.14	Tanggapan Responden Tentang Keikutsertaan Merumuskan dan Menetapkan Peraturan Desa	76
Tabel.V.15	Tanggapan Responden Tentang Kondisi Kelembagaan Adat	76
Tabel.V.16	Tanggapan Responden Tentang keikutsertaan Dalam Membina Lembaga Adat	78
Tabel.V.17	Tanggapan Responden Tentang kepatuhan Terhadap Lembaga Adat	79

Tabel.V.18	Tanggapan Responden Terhadap Adanya Keputusan- Keputusan Lembaga Adat	81
Tabel.V.19	Tanggapan Responden Tentang Pertanggungjawaban BPD Dalam Memelihara Nilai-Nilai Adat	82
Tabel.V.20	Tanggapan Responden Tentang BPD Yang Telah Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	86
Tabel.V.21	Tanggapan Responden Tentang Aspirasi Yang Telah Disalurkan Ke Instansi Berwenang	88
Tabel.V.22	Tanggapan Responden Tentang Aspirasi Yang Diberikan Oleh Masyarakat Pada BPD	89
Tabel.V.23	Tanggapan Responden Tentang BPD Yang Menyerap Aspirasi Masyarakat	91
Tabel.V.24	Tanggapan Responden Tentang Tata Cara Menyampaikan Aspirasi	93
Tabel.V.25	Rekapitulasi Dari Hasil Angket Tentang Fungsi BPD di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis	94
Tabel.V.26	Sarana Dan Prasarana BPD di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis	98
Tabel.V.27	Daftar Impralis Barang BPD di Kantor Kepala Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis	99

RIWAYAT HIDUP PENULIS



ALLAH akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Mujaadilah: ayat 11).

Refiden dilahirkan di Desa Api-Api 22 tahun yang silam tepatnya 11 April 1988. Penulis merupakan anak ke tiga (3) dari enam (6) bersaudara pasangan bapak Nurdin dan ibu Darmi.

Latar belakang pendidikan penulis dimulai dari SDN 008 Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, pada tahun 1994-2000, dan melanjutkan ke SLTPN 04 Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis pada tahun 2000-2003. Selanjutnya melanjutkan SMAN 2 Bengkalis di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2004-2007. Pada tahun 2007 penulis melanjutkan studi ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Pada tanggal 01 Juli - 31 Agustus tahun 2010 penulis mengikuti program Peraktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Bupati Bengkalis dan pada tanggal 23 November 2010 penulis dinyatakan lulus Mengikuti Ujian Seminar Proposal. selanjutnya penulis melanjutkan penulisan skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis”*** dan diujian Munaqasyahkan (Ujian Sarjana) pada tanggal 24 Januari 2011 dengan nilai skripsi **B** di bawah bimbingan bapak Mahmuzar, M.Hum dan bapak Drs. H. Kodri H. Nawawi, MA dengan **IPK 3,28 (Sangat Memuaskan)**.